



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara N Republik Indonesia nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah;
5. Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Papua Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Bapperinda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah Pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional;
10. Rencana Kerja Pernerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

12. Rencana...../5

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabatan dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RTRW, dan RIPPP.

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD terdiri dari :
 - BAB 1 : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
 - BAB VI : Penutup

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahn RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB V...../7

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dalam perspektif umum dijelaskan sebagai proses yang berlangsung secara dinamis sejalan dengan beragam perubahan kondisi umum (global, nasional dan lokal), perubahan isu dan permasalahan, perubahan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah (Pemda) berupaya seoptimal mungkin menempuh proses dan hasil perencanaan pembangunan secara sistematis berkaitan dengan hal-hal pokok arah pembangunan ke depan, mulai visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan guna menuntaskan berbagai permasalahan pembangunan di daerah agar pada akhirnya dapat menyelesaikan beragam permasalahan melalui pemanfaatan seluruh kekuatan dan peluang serta mengatasi beragam kelemahan dan tantangan pembangunan di daerah.

Untuk itu secara prinsip bahwa pembangunan daerah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan daerah, wawasan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan serta berbagai dimensi lainnya dan bahkan mencakup peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Secara spesifik arti perencanaan pembangunan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan

berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Atas dasar kondisi-kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah sejak awal hari berupaya menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang secara komprehensif mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan pembangunan daerah agar dalam implementasi dan realisasinya ke depan pencapaian hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua Tengah dapat jauh lebih baik dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Pembangunan daerah dalam hal ini diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomii khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, Pemerintahan melakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua. Langkah ini dilaksanakan sesuai amanat Pasal 93 dari peraturan pemerintah no 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembangaan pelaksanaan kebijakan otonomii khusus Papua, maka implementasi pemekaran daerah di Papua ditunjukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan, pelayanan publik serta serta mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat martabat orang asli papua dengan memperhatikan aspek politik, administrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastuktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan aspirasi masyarakat papua. Kemudian lebih lanjut pada tahun 2022 pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Papua Tengah Sebagai salah Satu Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu menyusun dokumen Perencanaan salah satunya yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Berdasarkan hal ini sehingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 sebagai dokumen yang akan

dugunakan untuk mencapai tujuan Pembangunan sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dimana Tujuan Perencanaan Pembangunan adalah mewujudkan Pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomii Khusus bagi Provinsi Papua.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
7. Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Tentang Pembinaan dan Pengawasan (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomii Khusus Bagi Provinsi Papua;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
21. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Ipmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
29. Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemuktahiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dilaksanakannya/dilakukannya penyusunan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Provinsi Papua Tengah ini adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten dengan visi pembangunan nasional serta potensi dan kebutuhan yang dimiliki oleh provinsi Papua Tengah serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045 adalah:

1. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis dalam pembangunan daerah jangka panjang di Provinsi Papua Tengah
2. Merumuskan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah jangka panjang tahun 2025-2045 di Provinsi Papua Tengah.
3. Menjabarkan tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah Jangka Panjang, termasuk strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian dalam 4 tahapan pembangunan
4. Mendorong Pembangunan Provinsi Papua Tengah untuk dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka Panjang regional dan nasional.

1.4. Tahapan Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tahapan sebagai berikut :

A. Persiapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, Meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan Otorisasi RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RPJPD 2025-2045;
4. Analisa data Evaluasi Hasil RPJPD periode Sebelumnya;
5. Intervensi data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; dan
6. Hal-hal yang diperlukan dalam Proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

B. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD tahun 2025-2045

Rumusan Rancangan Awal RPJPD tahun 2025-2045 yang mencakup Analisis Gambaran umum kondisi Daerah, Analisis trendemografi dan kebutuhan saran dan prasarana pelayanan public, analisi permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang, visi dan misi daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Selanjutnya dokumen rancangan awal

dilakukan konsultasi public Bersama dengan para pemangku kepentingan.

C. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

1. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD 2025-2045 berdasarkan hasil konsultasi rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045; dan
2. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045, dilaksanakan paling lambat pada Minggu Pertama bulan April Tahun 2024.
3. Selanjutnya Kepala Bappeda melakukan Musrenbang RPJPD tahun 2025-2045 dengan melibatkan Pemangku Kepentingan sesuai aturan yang berlaku.

D. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

1. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045; dan
2. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei 2024.

E. Penetapan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045

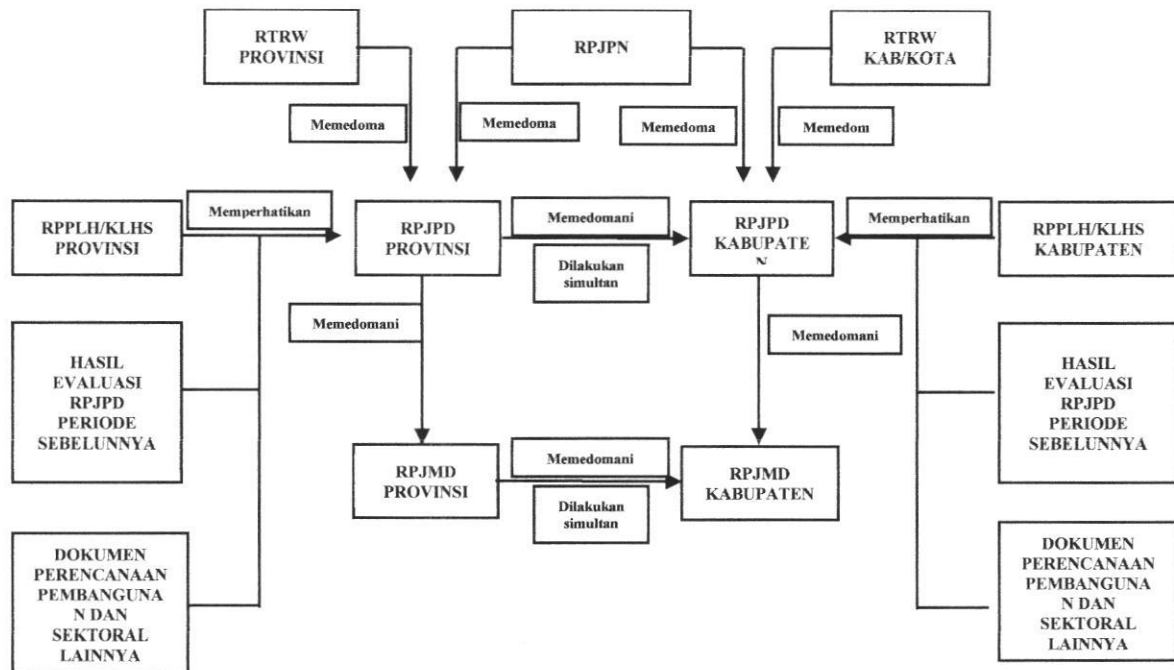
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 disempurnakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
2. Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;
3. Sekretaris daerah menugaskan biro/ bagian yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah;
4. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 diserahkan kepada Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman;

5. Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daerah rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibubuhi paraf persetujuan;
6. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2024;
7. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Agustus Tahun 2024; dan
8. Kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

1.5. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah berpedoman, mengacu dan memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Provinsi maupun pusat. Pada Tingkatan, RPJPD Provinsi Papua Tengah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tengah dan Rencana Tata Ruang Provinsi Papua. Sedangkan keterkaitan dengan level pemerintah pusat adalah RPJPD Provinsi Papua Tengah mengacu pada Rencana RPJP Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya juga menjadi salah satu penyelarasan Perencanaan Antar Dokumen dimana Dokumen RPJPD harus Memperhatikan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahannya, Serta Aspek Politik dan Sosial budaya. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah. Selengkapny keterkaitan antara RPJPD Provinsi Papua Tengah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai Berikut;

Gambar 1. 1 Sasaran Pokok Misi dan indikator Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045



Sumber Data :Imendagri nomor 1 Tahun 2024

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 ini mempunyai sistematika penulisan yang mengacu kepada muatan RPJPD sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permendagri No 86 Tahun 2017, yakni paling sedikit memuat sistematika sebagai berikut: (a) Pendahuluan; (b) Gambaran Umum Kondisi Daerah; (c) Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana; (d) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; (e) Penelaahan dengan Dokumen Lainnya; (f) Visi dan Misi; (g) Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang; dan (h) Penutup.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka sistematika penulisan Dokumen Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Papua Tengah yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan rancangan awal RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Dokumen Rekomendasi yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan pada Dokumen Rekomendasi agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi wilayah di Provinsi Papua Tengah meliputi aspek geografi, demografi kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah yang dapat menjadi dasar perumusan permasalahan daerah jangka panjang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Berisi tentang penjabaran permasalahan dasar yang menjadi perhatian lingkup daerah provinsi selama 20 tahun ke belakang dan akan fokus diselesaikan dalam 20 tahun yang akan datang dalam rangka percepatan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penjabaran berbagai isu dan lingkungan strategis yang berdampak pada pembangunan daerah baik di tingkat regional, nasional, dan internasional.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjabarkan mengenai visi dan misi kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 beserta upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Menjelaskan serangkaian rekomendasi arah kebijakan berupa rumusan kerangka pikir atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang mempertimbangkan sumber daya (potensi), waktu dan lokasi, target sasaran serta disesuaikan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dilakukan pemerintah provinsi Papua Tengah dalam menyusun Dokumen RPJPD 2025-2045.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.3.1 Aspek Geografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

2.3.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wiiayah Administratif

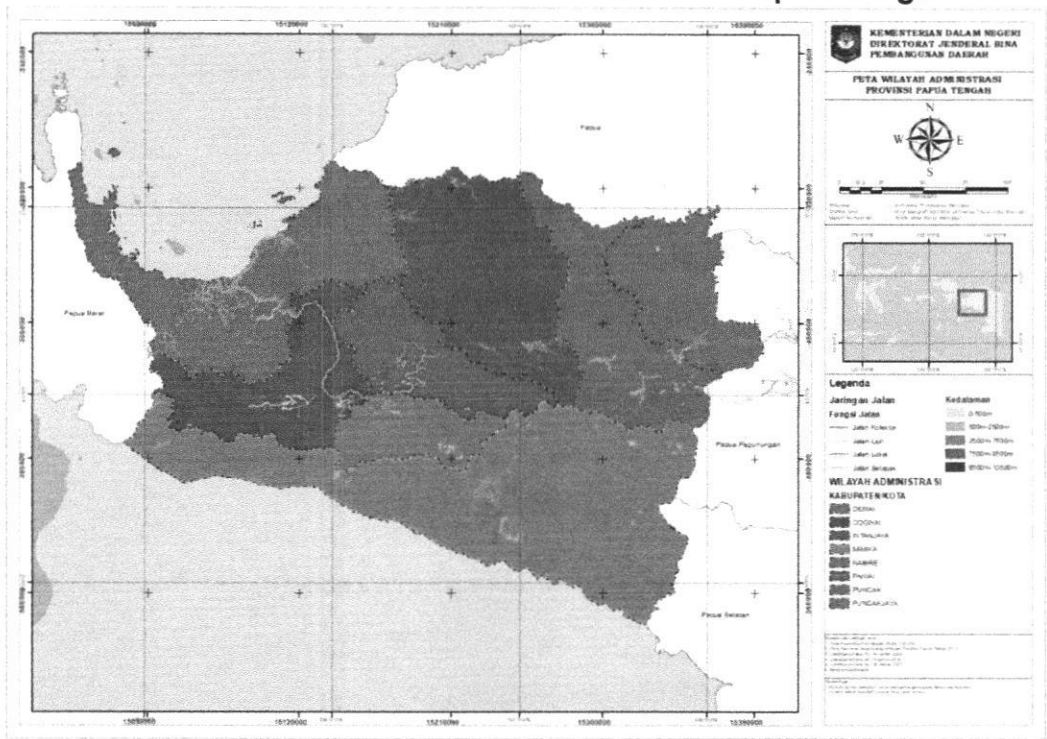
Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian barat, Provinsi Papua Pegunungan di bagian timur, Provinsi Papua di bagian utara dan Provinsi Papua Selatan di bagian selatan. Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Mimika merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 21.693,51 km², sedangkan Kabupaten Deiyai merupakan wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 537,39 km². Untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah dan batas administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2022

No	Kabupaten	Ibukota Kabupaten	Luas (Km2)	Presentase Terhadap Luas Provinsi
1	2	3	4	
1	Nabire	Nabire	11.806,09	19,33
2	Paniai	Enarotali	5.306,87	8,69
3	Puncak Jaya	Mulia	5.986,19	9,80
4	Mimika	Timika	18.298,95	29,9
5	Puncak	Ilaga	7.701,03	12,61
6	Dogiyai	Kigami	3.792,93	6,21
7	Intan Jaya	Sugapa	5.334,45	8,73
8	Deiyai	Tigi	2.846,41	4,66
Papua Tengah		Nabire	61.072,91	100,0

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Gambar 2.1. 1 Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 20

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan/Distrik, Kelurahan, dan Desa/Kampung menurut Kabupaten 2019-2023

No	Kabupaten	Distrik	Kelurahan	Kampung
1	2	3	4	5
1	Nabire	15	9	89
2	Paniai	24	5	216
3	Puncak Jaya	26	3	302
4	Mimika	18	19	152
5	Puncak	25	-	206
6	Dogiyai	10	-	79
7	Intan Jaya	8	-	97
8	Deiyai	5	-	67
Jumlah		131	36	1.208

Sumber Data : BPS Papua Tengah, 2024 (data diolah)

Berdasarkan data diatas terdapat 131 Distrik/Kecamatan, 36 Kelurahan, dan 1.395 kampung/desa yang tersebar pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

B. Topografi

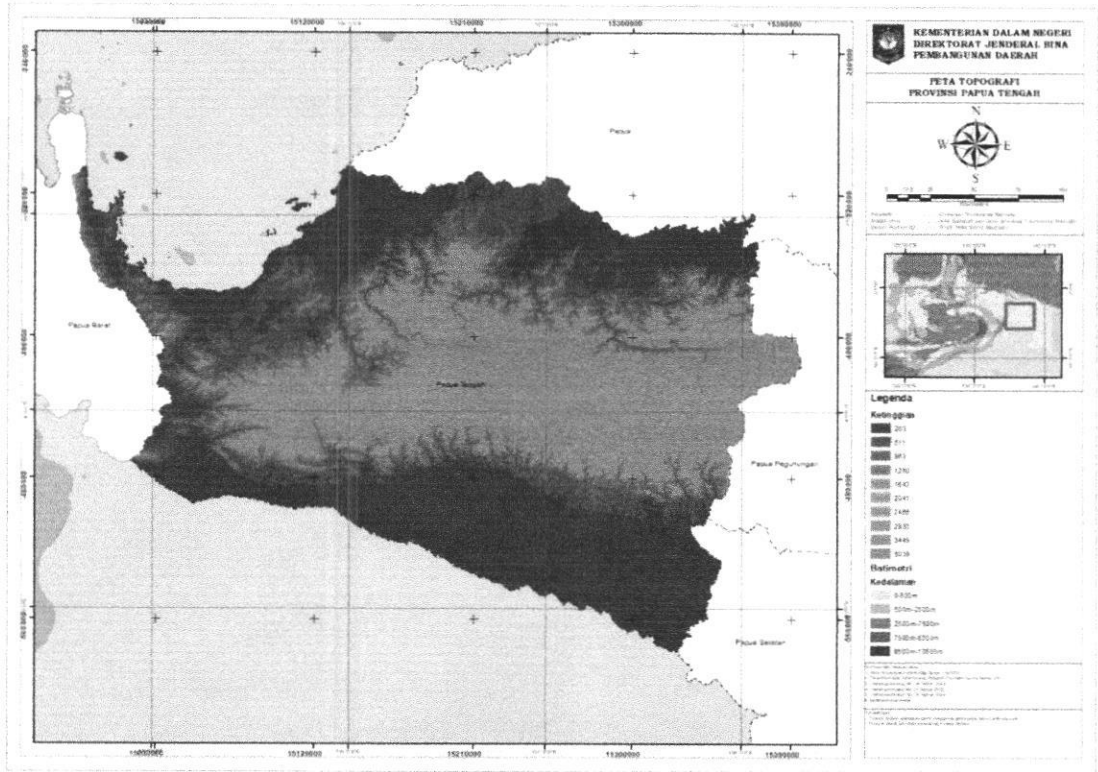
Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografi, yaitu pesisir (dataran rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran rendah dengan luas mencapai 23.957,80 km2 pada ketinggian <203 mdpl dan memiliki wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.078,18 km2 pada ketinggian 3499-5039 mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Ketinggian (Mdpl)	Jarak Ke Ibukota Provinsi
1	2	3	4
1	Nabire	7,00	587
2	Paniai	1.770,95	503
3	Puncak Jaya	2.119,67	330
4	Mimika	62,00	480
5	Puncak	2.303,59	377
6	Dogiyai	1.556,13	546
7	Intan Jaya	2.101,45	430
8	Deiyai	1.738,66	524

Sumber : BPS Papua Tengah, 2024

Gambar 2.1. 2 Peta Topografi Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

C. Hidrologi

Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terluas adalah Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seluas 16.669,87 km² sedangkan luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan seluas 5,31 km². Untuk lebih jelasnya mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran Sungai dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 3 Cakupan Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah

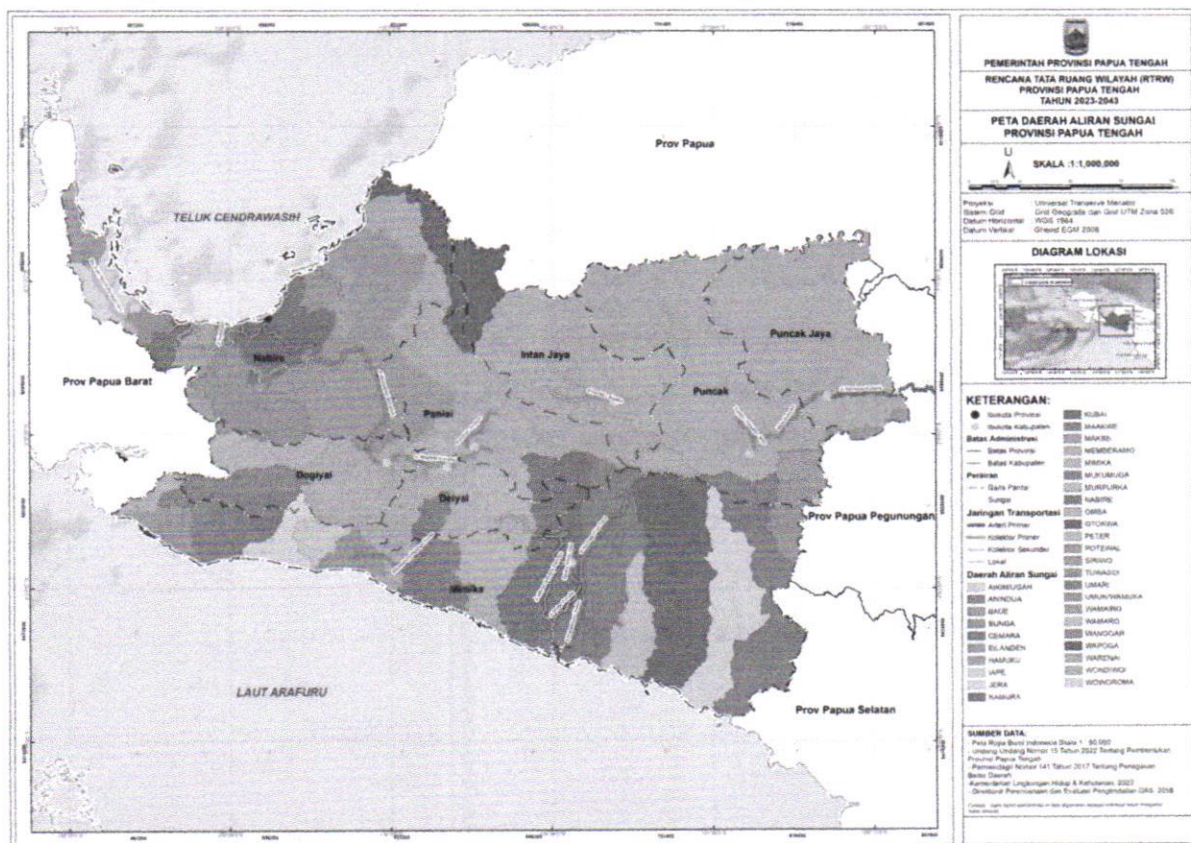
No.	Kabupaten	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
1	Nabire	Baue	40.460,15
		Hamuku	53.213,34
		Kubai	31.331,60
		Makimi	80.827,19
		Murpurka	126,33
		Nabire	136.025,00
		Omba	3.432,61
		Siriwo	362.783,37
		Tuwasoi	26.886,50
		Wamairo	24.644,45

No.	Kabupaten	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
		Wanggar	161.651,57
		Wapoga	72.660,85
		Warenai	123.727,24
		Wondiwoi	5.566,69
		Woworoma	74.966,28
		DAS di Pulau-Pulau Kecil	6.361,83
	Luas DAS Nabire		1.180.020,55
2	Paniai	Kamura	51.606,88
		Mamberamo	78,60
		Mimika	19.738,55
		Mukumuga	14.913,84
		Murpurka	162.231,62
		Siriwo	80.230,81
		Wapoga	16.623,27
		Warenai	185.205,18
	Luas DAS Paniai		530.628,75
3	Puncak Jaya	Eilanden	14.670,78
		Mamberamo	585.023,41
	Luas DAS Puncak Jaya		599.694,20
4	Mimika	Aikimiugah	195.815,13
		Anindua	31.039,46
		Bunga	39.841,19
		Cemara	209.879,12
		Iape	38.822,14
		Jera	49.379,79
		Kamura	171.150,84
		Maakwe	91.848,54
		Mimika	109.071,37
		Mukumuga	249.286,27
		Murpurka	42.571,33
		Omba	24.191,87
		Otokwa	316.098,18
		Peter	1.816,00
		Potewal	48.107,43
		Umari	80.598,87
		Umuk/Wamuka	43.343,77
		Wamaro	90.039,79
		Warenai	618,24
	Luas DAS Mimika		1.833.519,35
5	Puncak	Aikimiugah	23,30
		Bunga	18.684,93
		Cemara	40.925,07
		Eilanden	42.376,59
		Mamberamo	635.525,89
		Mukumuga	407,50
		Otokwa	861,76
		Peter	431,27
		Warenai	31.677,67
	Luas DAS Puncak		770.913,98

No.	Kabupaten	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (ha)
6	Dogiyai	Anindua	76.118,82
		Iape	19,58
		Jera	4.888,40
		Murpurka	177.024,95
		Omba	79.814,45
		Siriwo	12.599,47
		Umari	21.820,13
		Wanggar	6.764,69
	Luas DAS Dogiyai	379.050,49	
7	Intan Jaya	Mamberamo	353.908,13
		Mukumuga	110,75
		Murpurka	49,66
		Wapoga	84.461,77
		Warenai	95.028,91
	Luas DAS Intan Jaya	533.559,21	
8	Deiyai	Kamura	43.996,84
		Maakwe	29.017,35
		Mimika	121.625,30
		Mukumuga	0,21
		Murpurka	89.950,75
	Luas DAS Deiyai	284.590,45	
Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah			6.111.976,98

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043**

Gambar 2.1.3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Papua Tengah



D. Rawan Bencana

Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, likuifaksi dan gempa bumi.

1. Banjir

Banjir merupakan salah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Papua Tengah adalah banjir dan banjir rob. Banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang.

Tabel 0.4 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Banjir per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha)		
	Kerawanan Rendah	Kerawanan Sedang	Kerawanan Tinggi
Nabire	535,31	16522,70	182597,77
Paniai	23,88	127,21	19555,71
Puncak Jaya	274,33	11638,12	100652,44
Mimika	1289,23	61657,33	520170,04
Puncak	141,66	7421,94	69626,82
Dogiyai	50,74	442,34	15507,38
Intan Jaya	1,00	252,13	3769,39
Deiyai	31,21	2504,53	22384,17

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mimika memiliki daerah rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Pada Februari 2023 terjadi banjir bandang di Kabupaten Mimika, tepatnya di Distrik Tembagapura dimana PT Freeport Indonesia berada. Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan yaitu pada Januari dan Februari. Fenomena ini berdampak pada peningkatan kejadian hujan lebat yang dapat menyebabkan

bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua.

Selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire juga terdampak oleh bencana banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir pada akhir tahun 2022 lalu. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Legari.

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugian seperti kerusakan bangunan dan barang akibat terendam air, gangguan kesehatan warga, kerusakan lahan pertanian dan kebun, pencemaran lingkungan, bahkan hingga hilangnya nyawa. Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan mitigasi bencana dan pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait kondisi cuaca di provinsi ini.

2. Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Meskipun tsunami tidak terlalu merusak garis Pantai, namun potensi bahaya dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi. Fenomena tsunami seringkali terjadi karena gempa yang disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau tanah longsor terjadi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa mencapai pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan. Area berada pada risiko yang lebih besar jika berlokasi kurang dari 25 meter di atas permukaan laut dan dalam beberapa meter dari garis pantai.

Tabel 0.5 Kabupaten dan Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Tingkat Kerawanan Tsunami	Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)
Rendah	Mimika	5072,75
	Nabire	498,09
Sedang	Nabire	1357,30
Tinggi	Nabire	2716,56

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Meskipun Provinsi Papua tidak memiliki potensi terjadi tsunami atau bukan daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah terjadi gempa bumi besar yang disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK menyebutkan bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi Papua Tengah adalah dua kabupaten yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya yang berada di kawasan pesisir.

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi di musim kemarau. Saat musim kemarau, salah satu yang menjadi perhatian adalah gejala El Nino. El Nino terjadi akibat naiknya suhu muka laut di Pasifik. Bila kenaikan suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat *celsius*, maka Indonesia akan mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan.

Pulau Papua berpotensi mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan. Diketahui berdasarkan informasi BNPB, sejak tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan secara luas terjadi di tanah Papua. Peningkatan jumlah *hotspot* tidak terlepas dari pembukaan perkebunan yang besar-besaran di Papua. Jenis tanah yang terbakar adalah tanah gambut dan mineral. Berdasarkan pantauan citra satelit, perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan berlangsung cukup cepat dan luas di Papua. Aktivitas ini disertai dengan peningkatan kebakaran hutan dan lahan dalam pembersihan lahan. Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan di Papua ini banyak terjadi di Kabupaten Merauke dan Mappi.

Tabel 0.6 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)		
	Kerawanan Rendah	Kerawanan Sedang	Kerawanan Tinggi
Nabire	321790,81	167439,48	32415,72
Paniai	49524,36	40857,59	57087,54
Puncak Jaya	136220,12	81811,72	8442,17
Mimika	490680,50	170403,91	42253,01
Puncak	117972,98	78064,88	85435,94
Dogiyai	57501,44	29262,22	3069,48
Intan Jaya	46787,22	38167,35	8234,49
Deiyai	28351,20	23867,35	2970,27

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi karhutla berada di Kabupaten Puncak mengingat wilayah ini masih didominasi oleh kawasan hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan yang kecil karena curah hujan tinggi, namun segala bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan, tetap dipersiapkan sehingga pemerintah daerah tetap menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk berjaga-jaga.

4. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Salah satu contoh cuaca ekstrem adalah siklon yang menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau berkepanjangan.

Tabel 0.7 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Nabire	243095,00	149416,00	89148,70
Paniai	10152,80	2819,05	25749,40
Puncak Jaya	30739,00	107009,00	43332,90
Mimika	734785,50	428652,50	277020,50
Puncak	44489,80	34729,80	65543,90
Dogiyai	13793,60	4352,65	8484,65
Intan Jaya	13059,20	645,42	37,30
Deiyai	46431,10	3386,67	14482,30

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Cuaca ekstrem kerap terjadi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas dengan tingkat kerentanan tinggi. Meski demikian, dampak cuaca ekstrem cukup dirasakan oleh Kabupaten Puncak. Kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun terjadi di kabupaten ini. Oleh karena morfologi Kabupaten Puncak merupakan daerah pegunungan, maka ketika terjadi fenomena el nino justru menimbulkan turunnya hujan es sehingga tanaman perkebunan menjadi mati dan gagal panen.

5. Likuifaksi

Fenomena likuifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang membuat tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air. Fenomena ini biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah atau zona-zona dengan tanah yang mengandung air. Salah satu contohnya yaitu di dekat pantai atau di daerah gempa, dimana ada lapisan yang mengandung air seperti tanah pasir.

Tabel 0.8 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Likuiifaksi per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

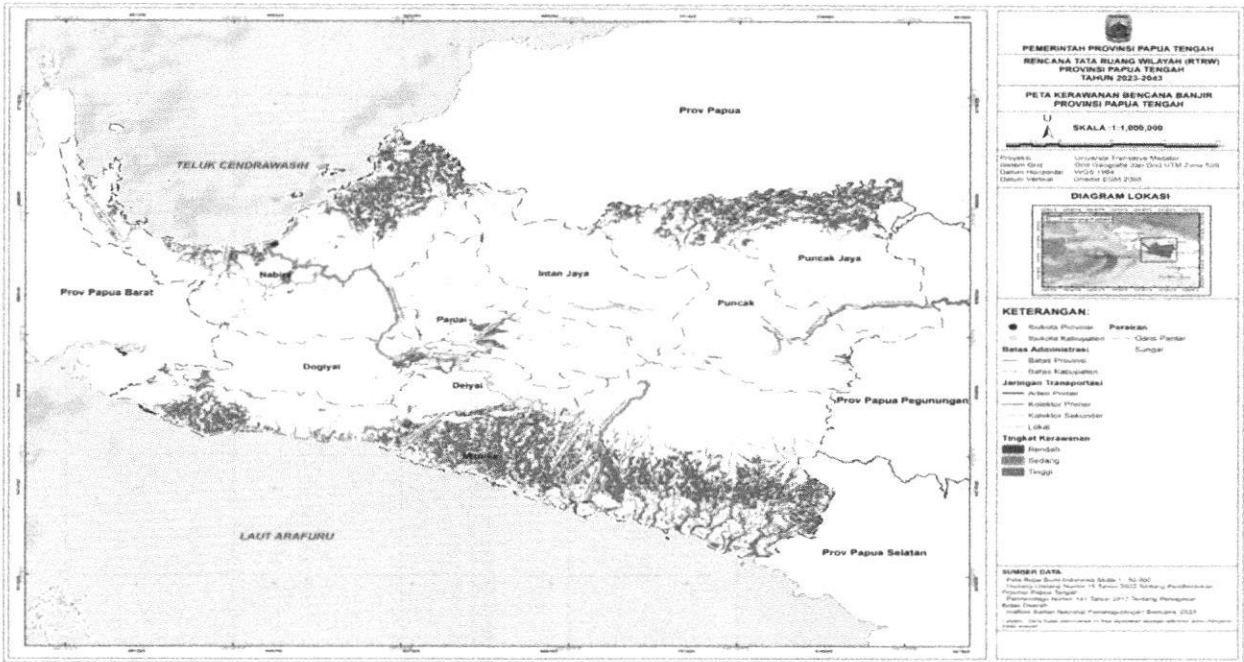
Kabupaten	Luas Wilayah Rawan Likuiifaksi (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Nabire	265462,91	91288,39	2609,68
Paniai	19647,05	2193,49	0,00
Puncak Jaya	24323,48	152623,56	0,00
Mimika	312916,52	879237,68	3792,25
Puncak	15650,07	111140,88	0,00
Dogiyai	12496,77	13454,94	0,00
Intan Jaya	6564,27	5832,31	0,00
Deiyai	529,59	38897,47	0,00

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan likuiifaksi tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan Nabire. Salah satu faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten tersebut yang merupakan kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, likuiifaksi rentan terjadi di daerah dengan struktur tanah berbutir halus dan jenuh air.

6. Gempa Bumi

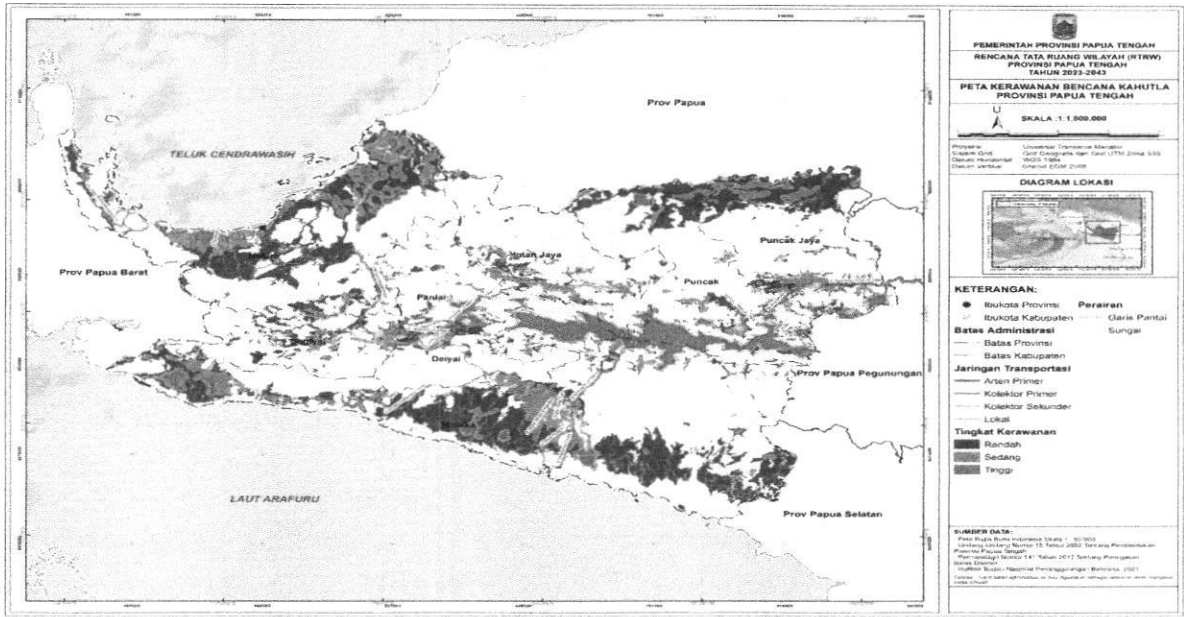
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang *seismik*. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana alam gempa bumi yang tinggi. Kawasan dengan kerawanan gempa bumi yang rendah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika. Sementara daerah lainnya masuk ke dalam zona tingkat kerawanan yang tinggi.



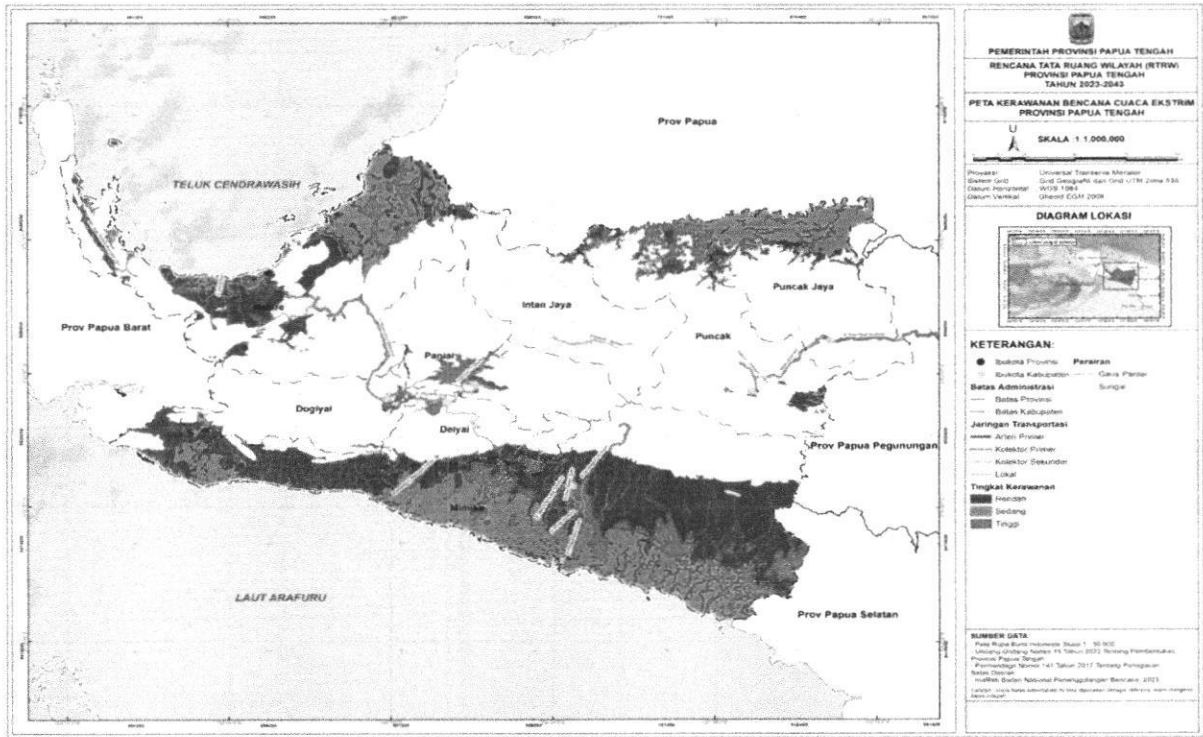
Gambar 0.1.4 Peta Kerawanan Bencana Banjir Provinsi Papua Tengah



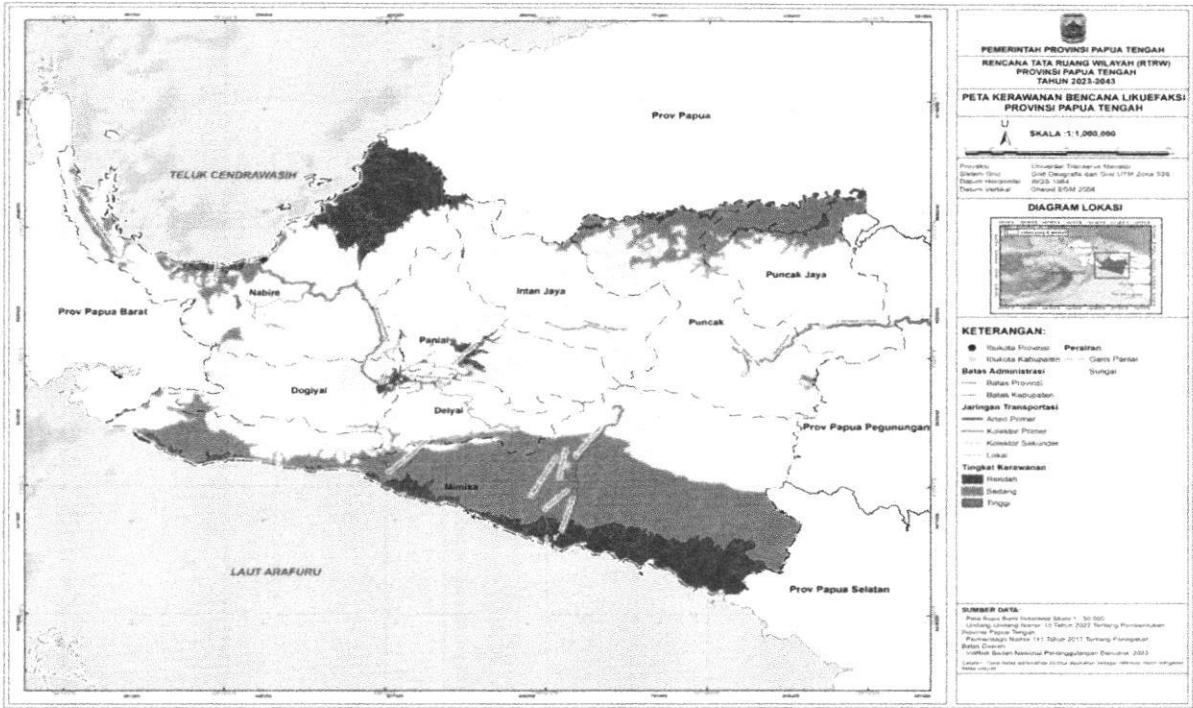
Gambar 0.1.5 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Provinsi Papua Tengah



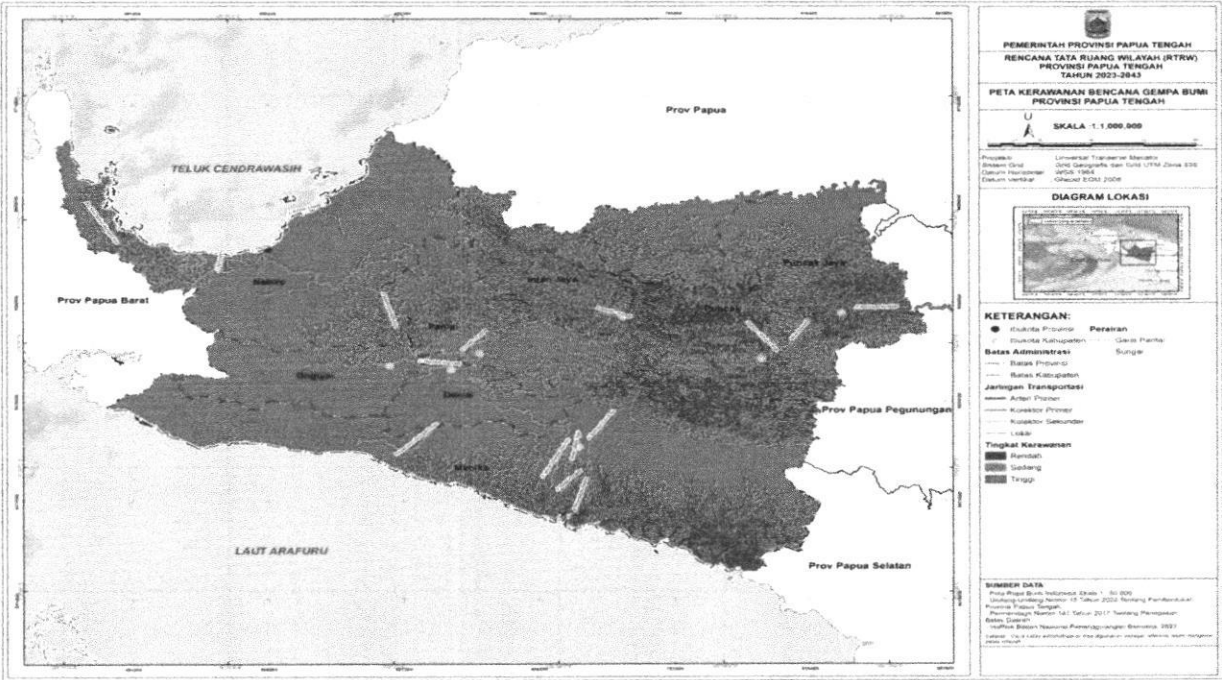
Gambar 0.1.6 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Papua Tengah



Gambar 0.1.7 Peta Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrem Provinsi Papua Tengah



Gambar 0.1.8 Peta Kerawanan Bencana Likuifaksi Provinsi Papua Tengah



Gambar 0.1.9 Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Provinsi Papua Tengah

2.3.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.3.2.2.1 Potensi Hutan

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah berdasarkan dari Peta Rupa Bumi Indonesia mencapai 11.667,75 km². Sementara luas lahan Hutan Provinsi Papua Tengah mencapai 5.828.043 Kawasan hutan yang terbesar di Provinsi Papua Tengah ini berupa Hutan Lindung yang luasnya mencapai 2.293.552 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 9 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

No	Kabupaten	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan					
		Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	15.848.672	6.890.351	90.772.441	35.476.446	N/A	31.425.993
2	Paniai	-	4.573.208	28.182.703	23.540.809	N/A	68.686
3	Puncak Jaya	-	9.311.408	52.253.757	30.011.048	N/A	4.502.407
4	Mimika	4.936.500	23.946.464	88.781.585	21.902.916	N/A	37.995.705
5	Puncak	887.365	22,124.76	887.365,00	279.549.88	N/A	131,953.17
6	Dogiyai	89.408	635.911	33.423.889	29.433.205	N/A	3.265.365
7	Intan Jaya	479.941	2.681.830	49.550.241	41.886.063	N/A	4.502.407
8	Deiyai	918.091	2.375.207	25.248.469	21.390.810	N/A	564.361
Papua Tengah		23.159.977	50.414.379	369.100.450	203.641.297	N/A	82.324.924

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024

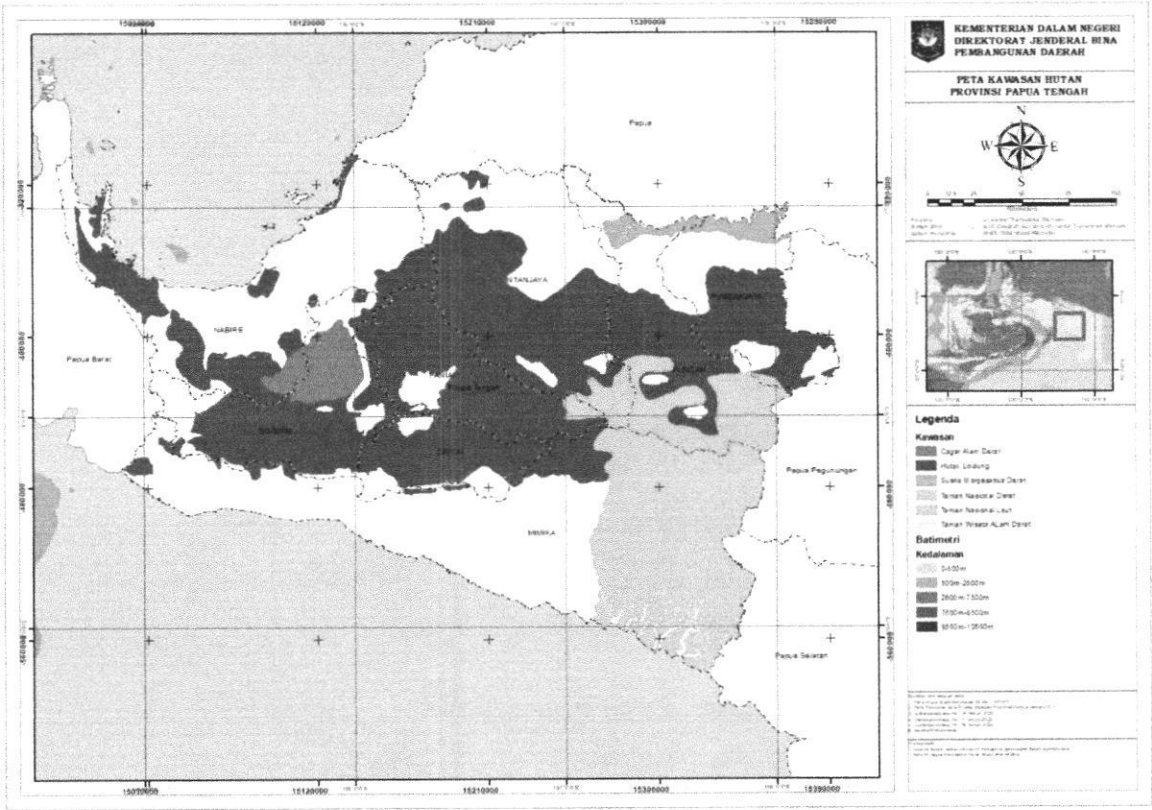
Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas berada di Kabupaten Mimika mencapai 177.563.170 Ha, sementara luas hutan dan perairan yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Tabel 2. 10 Luas Kawasan Peruntukan Hutan Provinsi Papua Tengah

No	Keterangan	Luas (Km2)
1	2	3
1	Cagar Alam Darat	1.418,85
2	Hutan Lindung	24.888,42
3	Suaka Margasatwa Darat	931,16
4	Taman Nasional Darat	11.336,87
5	Taman Nasional Laut	18,11
6	Taman Wisata Alam Darat	62,78

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

Gambar 2.1.10 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tengah



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil Pengolahan Data Tahun 2022

B. Kawasan Hutan Rakyat

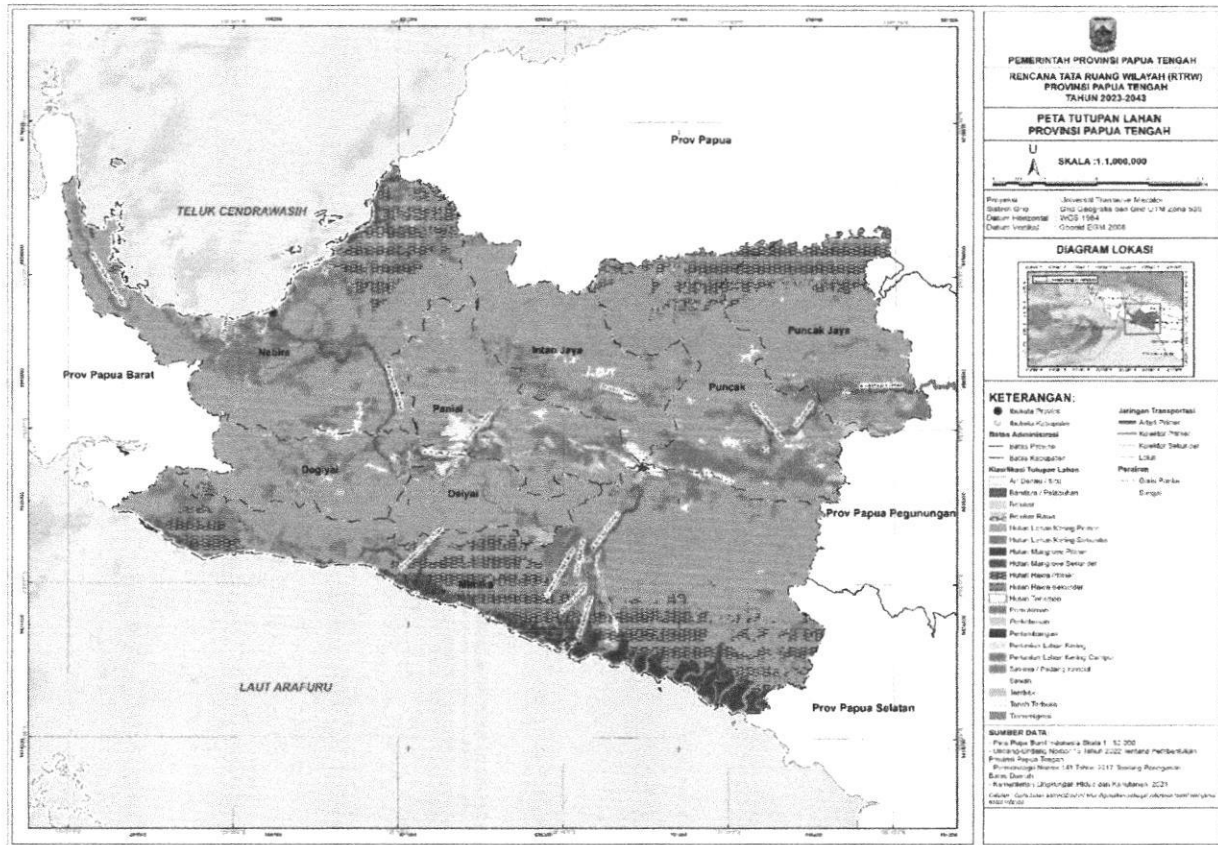
Kawasan hutan rakyat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertanian merupakan kawasan yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan hutan rakyat. Untuk lebih jelas mengenai kawasan hutan rakyat dapat melihat rincian luasan tutupan lahan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 11 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tengah

No	Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)
1	Air Danau / Situ	24271,37
2	Bandara / Pelabuhan	654,60
3	Belukar	137203,81
4	Belukar Rawa	72281,63
5	Hutan Lahan Kering Primer	3696095,75
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	623370,34
7	Hutan Mangrove Primer	209088,02
8	Hutan Mangrove Sekunder	13018,73
9	Hutan Rawa Primer	756094,67
10	Hutan Rawa Sekunder	76060,91
11	Hutan Tanaman	9,62
12	Pemukiman	15985,35
13	Perkebunan	19692,89
14	Pertambangan	1624,07
15	Pertanian Lahan Kering	18986,97
16	Pertanian Lahan Kering Campur	200750,10
17	Savana / Padang rumput	160972,94
18	Sawah	1401,69
19	Tambak	83,12
20	Tanah Terbuka	80798,95
21	Transmigrasi	3531,46
Grand Total		6111976,98

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043 **

Gambar 2.1.11 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043**

2.3.2.2.2 Potensi Perikanan

A. Periklanan Tangkap

Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagi dua, yaitu perairan utara Papua Tengah tergabung dalam WPP 717 yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km²) sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjang pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki potensi sumber daya hayati

perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua Tengah. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Tengah Utara dengan pusat kegiatan di Nabire;
- Laut Papua Tengah dengan pusat kegiatan di Mimika.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhana. Perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional, contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

Tabel 2.12 Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	2.905	2.936	2.910
2	Paniai	-	-	-
3	Puncak Jaya	-	-	-
4	Mimika	-	-	-
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-
8	Deiyai	106	106	106
Papua Tengah		3.011	3.042	3.016

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023

B. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut :

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih di Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Timika.
- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika.

- Perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan Kabupaten) yaitu Kab Nabire, Kab. Timika, Kab. Paniai, Kab.Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan nila.

Tabel 2.13 Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya
Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	53	53	53
2	Paniai	-	-	-
3	Puncak Jaya	-	-	-
4	Mimika	-	-	-
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-
8	Deiyai	12	12	12
Papua Tengah		65	65	65

*Sumber : BPS Provinsi Papua 2022 & data diolah Perangkat
Daerah data Sementara ***

2.3.2.2.3 Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagian besar pertambangan emas, granit dan tembaga. Pertambangan emas masih mendominasi potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelas mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Potensi Mineral Logam dan Non Logam

Kabupaten	Lokasi	Jenis Galian Mineral
1	2	3
Nabire	Yaur	Pasir Kuarsa, Granit, Marmer
	Lagari	Emas
	S.Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin

Kabupaten	Lokasi	Jenis Galian Mineral
1	2	3
	KaliBumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Napan	Emas, Tembaga
	Wapoga	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, Tembaga
	Ilaga	Arsenit, Tembaga, Emas, Perak
Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet
	Uwagimamo	Emas, Tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, Emas
	Komopa	Tembaga, Emas
Mimika	Tembagapura	Tembaga, Perak, Emas
Intan Jaya	Sugapa (Bulagi)	Emas

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Papua, 2016

2.3.2.2.4 Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah ialah: : 1) Taman Nasional Lorentz (wilayahnya meliputi beberapa kabupaten diantaranya : Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya) ; 2) Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Nabire. Serta beberapa destinasi pariwisata lainnya antara lain : 1) Danau Tigi di Kabupaten Deiyai ; 2) Danau Paniai dan Danau Tage di Kabupaten Paniai ; 3) Danau Mamae dan Air Terjun Bihewa di Kabupaten Nabire ; dan 4) Ekowisata Piramida Cartens (wilayahnya meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya). Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek wisata budaya (dengan dikembangkannya

kawasan strategis sosial budaya Wilayah La Pago dan Mee Pago), obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.

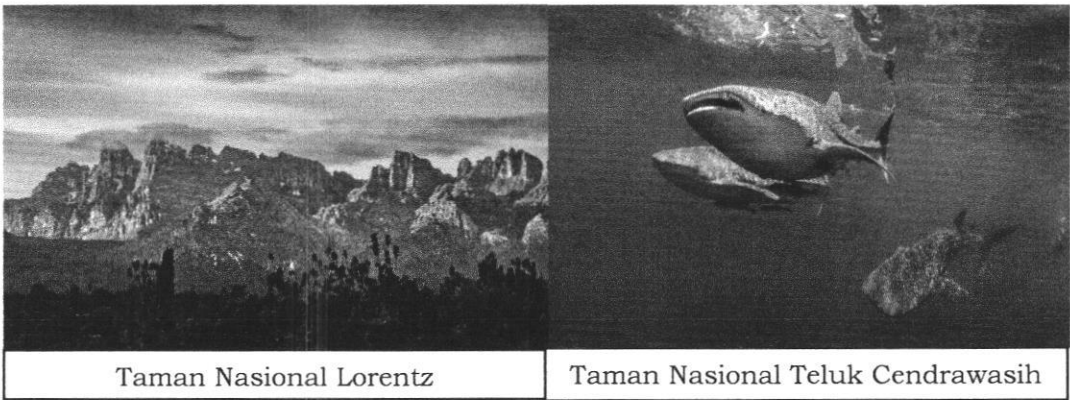
Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua Tengah yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika) dan KP Paradoi (Kabupaten Nabire). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Tabel 2. 15 Jumlah Objek Wisata per Kabupaten
di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Jumlah Objek Wisata		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	94	94	113
2	Paniai	2	2	2
3	Puncak Jaya	1	1	1
4	Mimika	1	1	1
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	1	1	1
8	Deiyai	1	1	1
Papua Tengah		100	100	119

Sumber : Nabire Dalam angka 2022 data diolah bapperida PPT (data sementara)**

Gambar 2.1.12 Potensi Objek Wisata Pada Provinsi Papua Tengah



Sumber : Google.co.id

2.3.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, jumlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.408.991 jiwa di tahun 2021 dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21.960 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 jiwa pada tahun 2022. Sementara jumlah penduduk terendah pada tahun 2022 berada di Kabupaten Deiyai sebanyak 102.168 jiwa. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah tahun 2023 dan 2024

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Nabire	173,770	175,360
2	Paniai	232,570	236,530
3	Puncak Jaya	232,570	236,530
4	Mimika	323,820	327,780
5	Puncak	120,700	122,590
6	Dogiyai	122,990	125,180
7	Intan Jaya	141,710	143,850
8	Deiyai	104,610	106,500
Papua Tengah		1.452.740	1.474.320

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2010-2022 sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2020-2022 sebesar 1,53 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua Tengah periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tahun 2022.

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 dan 2024

No	Kabupaten	Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
		2023	2024	2023-2024
1	2	3	4	5
1	Nabire	173,770	175,360	0,78
2	Paniai	232,570	236,530	0,96
3	Puncak Jaya	232,570	236,530	1,48
4	Mimika	323,820	327,780	1,04
5	Puncak	120,700	122,590	1,39
6	Dogiyai	122,990	125,180	1,57
7	Intan Jaya	141,710	143,850	1,33
8	Deiyai	104,610	106,500	1,55
Papua Tengah		1.452,740	1.474,320	1,20

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai 11,91 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Deiyai dengan kepadatan penduduk mencapai 35,89 jiwa/km² dan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya dengan kepadatan penduduk mencapai 26,1 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Presentase Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		Rasio Jenis Kelamin (Population Sex Ratio)	
		2020	2022	2020	2022	2020	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	11,96	11,91	14,72	14,85	109,93	109,55
2	Paniai	16,01	16,06	43,82	44,57	119,44	118,81
3	Puncak Jaya	15,84	8,31	38,89	39,28	119,44	118,81
4	Mimika	22,29	22,25	17,70	17,91	119,31	118,88
5	Puncak	8,24	8,31	15,67	15,92	111,42	110,94
6	Dogiyai	8,47	8,50	32,43	33,00	108,33	108,01
7	Intan Jaya	9,75	9,77	26,56	26,97	109,94	109,49
8	Deiyai	7,20	7,23	36,75	35,89	112,00	111,60
Papua Tengah		99,76	92,34	226,54	228,39	909,81	906,06

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023

No	Kabupaten	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022**	2023 ***
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	11.084,22	11.178,38	12.015,16	12.692,86	13.561,88
2	Paniai	4.181,80	4.283,39	4.446,53	4.705,23	5.013,91
3	Puncak Jaya	1.404,63	1.387,23	1.407,07	1.450,21	1.509,37
4	Mimika	54.834,54	63.716,34	95.216,35	110.407,81	126.872,92
5	Puncak	1.400,81	1.438,05	1.513,26	1.612,81	1.669,26
6	Dogiyai	1.313,23	1.355,63	1.411,76	1.445,34	1.543,59
7	Intan Jaya	1.248,66	1.273,03	1.303,46	1.362,07	1.404,74
8	Deiyai	1.389,14	1.435,66	1.490,80	1.574,24	1.663,90
Papua Tengah		9.607,13	10.758,46	14.850,55	16.906,32	153.239,57

Sumber : BPS Pusat Statistik, Prov. Papua Dalam Angka 2023 & Papua Tengah Dalam angka 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB Provinsi Papua Tengah pada tahun 2019 sebesar 9.607,13 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 153.239,57 Miliar Rupiah.

Tabel 2.20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miliar Rupiah) 2019-2023

No	Kabupaten	Tahun				
		2019	2020	2021*	2022**	2023***
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	7.457,29	7.355,88	7.684,56	7.882,34	8.154,41
2	Paniai	3.020,87	3.034,64	3.084,64	3.194,46	3.272,18
3	Puncak Jaya	1.010,15	969,32	983,03	1.012,03	1.021,53
4	Mimika	45.651,03	50.871,59	69.618,91	80.277,60	86.625,49
5	Puncak	824,47	825,11	831,07	862,72	882,92
6	Dogiyai	892,88	895,96	906,90	914,01	938,58
7	Intan Jaya	761,71	758,85	767,00	787,24	806,77
8	Deiyai	833,65	830,73	841,20	873,28	889,62
Papua Tengah		7.556,51	8.192,76	10.589,66	11.975,46	101.701,88

Sumber : BPS Pusat Statistik, Prov. Papua Dalam Angka 2023 & Rancangan Akhir RKPD Prov. Papua 2023

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), selama kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 7.556,51 Miliar Rupiah (2019), 8.192,76 Miliar Rupiah (2020), 10.589,66 Miliar Rupiah (2021), 11.975,46 Miliar Rupiah (2022), dan pada tahun 2023 mencapai 101.701,88 miliar Rupiah.

2.2.2 Tingkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah mencapai 38,28% dari jumlah penduduk pada tahun 2021. Kabupaten Intan Jaya merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 42,03% dari jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2021, sedangkan Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah mencapai 14,28% dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten	Persentase Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	37,14	36,75	35,08	35,43	34,83
2	Paniai	65,54	65,98	62,57	62,97	61,14
3	Puncak Jaya	45,89	46,07	46,39	47,61	47,50
4	Mimika	31,79	31,75	30,95	31,58	30,31
5	Puncak	43,09	42,43	40,78	41,28	42,01
6	Dogiyai	30,37	28,31	28,38	29,32	29,32
7	Intan Jaya	21,10	20,46	21,31	21,86	21,16
8	Deiyai	31,87	30,98	30,83	31,04	30,18
Papua Tengah		38,34	37,84	37,03	37,63	37,05

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua), 2024.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Selama tahun 2019-2023, IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Tengah sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten Mimika, mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah mencapai 75,91 poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-2, dengan 71,36 poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 58,83 poin. Adapun pada tahun 2023, daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Puncak, dengan 44,71 poin. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Nabire	68,53	68,83	69,15	69,91	71,36
2	Paniai	56,58	56,31	56,70	57,14	58,83
3	Puncak Jaya	48,33	48,37	48,99	49,84	51,49
4	Mimika	74,13	74,19	74,48	75,08	75,91
5	Puncak	42,70	43,04	43,17	43,87	44,71
6	Dogiyai	55,41	54,84	55,00	55,72	56,74
7	Intan Jaya	47,51	47,79	48,34	49,25	50,39
8	Deiyai	50,11	49,46	49,96	50,42	51,4
Papua Tengah		55,41	55,35	55,72	56,40	57,60

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Provinsi Papua) 2024

2.2.4 Rata-rata lama sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Tabel 2.23 Rata- Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	9,70	10,00	10,01	10,16	10,33
2	Paniai	4,38	4,57	4,77	4,78	4,79
3	Puncak Jaya	3,61	3,62	3,74	4,03	4,23
4	Mimika	9,91	10,17	10,18	10,20	10,47
5	Puncak	1,96	2,15	2,16	2,17	2,19
6	Dogiyai	4,92	4,93	4,94	4,96	4,97
7	Intan Jaya	2,64	2,84	3,09	3,26	3,27

No	Kabupaten	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
8	Deiyai	3,00	3,01	3,25	3,26	3,27
Papua Tengah		5,02	5,16	5,27	5,35	5,44

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana hingga tahun 2023 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah hanya mencapai 5,44 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap penduduk usia sekolah. Daerah di Provinsi Papua Tengah yang memiliki RLS tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten Mimika dengan nilai RLS 10,47 artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2023 berada di Kabupaten Puncak dengan nilai 2,19.

2.2.5 Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tabel 2.24 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	11,59	11,92	12,18	12,44	12,64
2	Paniai	10,48	10,49	10,50	10,52	10,53
3	Puncak Jaya	6,96	7,24	7,49	7,50	7,51
4	Mimika	12,17	12,40	12,69	12,95	12,96
5	Puncak	5,19	5,39	5,40	5,58	5,59

No	Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
6	Dogiyai	10,57	10,58	10,59	10,61	10,62
7	Intan Jaya	7,36	7,65	7,66	7,67	7,69
8	Deiyai	9,80	9,81	9,82	9,84	9,85
Papua Tengah		9,27	9,44	9,54	9,63	9,67

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

2.2.6 Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua Tengah.

Tabel 2.25 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	67,97	68,06	68,03	68,41	68,73
2	Paniai	66,27	66,44	66,44	66,94	67,22
	Puncak Jaya	64,98	65,15	65,34	65,66	65,90
4	Mimika	72,27	72,32	72,38	72,57	72,83
5	Puncak	65,61	65,74	66,06	66,13	66,40
6	Dogiyai	65,60	65,73	65,85	66,13	66,39
7	Intan Jaya	65,51	65,60	65,58	65,93	66,12
8	Deiyai	65,11	65,24	65,36	65,66	65,93
Papua Tengah		66,67	66,79	66,87	67,17	67,44

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

2.2.7 Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.26 Pengeluaran Perkapita Masyarakat di Provinsi Papua Tengah Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	9.195	8.840	8.856	9.040	9.381
2	Paniai	6.767	6.361	6.377	6.554	6.977
3	Puncak Jaya	5.523	5.282	5.289	5.422	5.731
4	Mimika	12.035	11.431	11.400	11.647	12.076
5	Puncak	5.702	5.378	5.412	5.583	5.975
6	Dogiyai	5.709	5.373	5.415	5.705	6.182
7	Intan Jaya	5.593	5.283	5.328	5.624	6.140
8	Deiyai	4.958	4.632	4.673	4.808	5.104
Papua Tengah		6.935	6.573	6.594	6.798	7.195

Sumber : BPS Provinsi Papua,2024

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami kenaikan serta penurunan dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Peningkatan terjadi dari Tahun 2022 menuju Tahun 2023, kemudian cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Angka tertinggi berada di Tahun 2023 sebesar 7.195, pendapatan perkapita pada provinsi Papua tengah pada tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

2.2.8 Persentase Balita Gizi Buruk

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase balita gizi buru di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.27 Status Gizi Anak Balita Umur 0-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua Tengah dibuat terakhir 2024

No	Kabupaten	BB/U				TB/U			
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Resiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nabire	94	433	3.540	176	81	365	3.768	24
2	Paniai	15	26	136	44	13	17	166	15
3	Puncak Jaya	2	16	375	14	18	89	298	2
4	Mimika	174	573	6.673	333	217	614	6.850	72
5	Puncak	3	11	218	8	16	25	199	0
6	Dogiyai	21	30	143	11	40	44	119	2
7	Intan Jaya	2	10	56	2	0	7	63	0
8	Deiyai	14	27	217	19	29	41	201	6
Papua Tengah		325	1.126	11.358	607	414	1.202	11.664	121

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024**

Tabel 2.28 Angka Stunting Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan

No	Kabupaten	BB/TB					
		Gizi Buruk (0-59 Bulan)	Gizi Kurang	Normal	Resiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	115	293	3.444	276	84	26
2	Paniai	28	31	96	16	15	25
3	Puncak Jaya	0	8	348	31	17	3
4	Mimika	76	370	6.711	450	117	29
5	Puncak	0	5	184	41	10	0
6	Dogiyai	14	28	126	25	8	4
7	Intan Jaya	1	2	50	10	6	1
8	Deiyai	8	15	218	22	8	6
Papua Tengah		242	752	11.177	871	265	94

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024**

2.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk diatas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai 713.544 jiwa, yang terdiri dari 596.283 jiwa angkatan kerja atau sebanyak 76 % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 153.004 bukan angkatan kerja. Jumlah pengangguran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau sebanyak 2,20% dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kabupaten Mimika memiliki jumlah penduduk diatas 15 tahun tertinggi pada Provinsi Papua Tengah dengan jumlah mencapai 162.465 jiwa, yang terdiri dari 115.391 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 63,46 % dan 50.210 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Mimika mencapai 7,8 %.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua Tengah berada pada Kabupaten Puncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0 %.

Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten Nabire mencapai 6,65% atau sebanyak 5.425 jiwa pengangguran. Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah Tahun 2017-2021

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	68,09	72,38	69,75	74,15	73,09
2	Puncak Jaya	89,79	94,29	77,34	84,81	91,39
3	Paniai	90,39	89,17	87,92	58,41	89,26
4	Mimika	65,83	68,88	64,93	63,46	64,77
5	Puncak	92,08	94,43	79,47	85,95	89,43
6	Dogiyai	89,66	86,18	90,12	82,45	78,20
7	Intan Jaya	76,74	73,68	82,10	69,21	75,75
8	Deiyai	86,98	89,45	92,65	89,65	85,01
Papua Tengah		82,45	83,56	80,54	76,01	80,86

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

2.3. Aspek Daya Saing

Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tengah

Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifikasi dari akumulasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.30 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (juta rupiah) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.625.807,77	3.592.044,39	3.952.117,85	3.952.117,85	3.829.000,34
B. Pertambangan dan Penggalian	38.885.901,53	44.658.934,36	Tahun		78.342.000,43
C. Industri Pengolahan	135.169,86	237.772,45	246.843,41	246.843,41	241.000,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15.079,81	14.065,08	14.266,93	14.266,93	16.000,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.393,34	9.468,68	9.020,49	9.020,49	9000,50
F. Konstruksi	3.215.685,73	5.084.537,63	5.232.825,53	5.232.825,53	5.234.000,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.685.041,17	3.375.041,90	3.495.244,36	3.495.244,36	3.770.000,77
H. Transportasi dan Pergudangan	2.180.995,35	960.354,58	990.611,08	990.611,08	1.264.000,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	890.896,36	214.854,65	217.271,85	217.271,85	217.000,01
J. Informasi dan Komunikasi	253.779,72	1.536.800,58	1.549.919,96	1.549.919,96	1.686.000,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.393.742,48	319.468,19	459.518,28	459.518,28	558.000,91
L. Real Estate	693.647,21	888.679,46	894.871,54	894.871,54	986.000,44
M.N. Jasa Perusahaan	555.870,25	397.468,53	398.721,66	398.721,66	410.000,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.867.904,40	3.615.462,10	3.618.437,55	3.618.437,55	3.199.000,24
P. Jasa Pendidikan	1.386.320,81	465.515,91	473.909,62	473.909,62	482.000,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	414.521,21	431.359,01	456.953,77	456.953,77	444.000,24
R.S.T.U. Jasa lainnya	286.537,18	338.097,41	344.041,25	344.041,25	370.000,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	60.499.294,18	66.139.924,91	67.031.108,79	67.031.108,79	101.057.009,02

Sumber: Papua Tengah Dalam Angka, 2024 **

Tabel 2.31 Proporsi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (persen) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	3	4	5	6	7
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,99	5,43	5,90	5,90	4,10
B. Pertambangan dan Penggalian	64,27	67,52	66,65	66,65	75,00
C. Industri Pengolahan	0,22	0,36	0,37	0,37	0,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
F. Konstruksi	5,32	7,69	7,81	7,81	6,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	5,10	5,21	5,21	4,12
H. Transportasi dan Pergudangan	3,60	1,45	1,48	1,48	1,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,47	0,32	0,32	0,32	0,23
J. Informasi dan Komunikasi	0,42	2,32	2,31	2,31	1,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,30	0,48	0,69	0,69	0,58
L. Real Estate	1,15	1,34	1,34	1,34	0,98
M.N. Jasa Perusahaan	0,92	0,60	0,59	0,59	0,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	5,47	5,40	5,40	3,47
P. Jasa Pendidikan	2,29	0,70	0,71	0,71	0,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,65	0,68	0,68	0,44
R.S.T.U. Jasa lainnya	0,47	0,51	0,51	0,51	0,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber : Papua Tengah Dalam Angka, 2024***

Tabel diatas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama tahun 2019 – 2023, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi terbesar (75,00 %). Sektor (F): Konstruksi dan sektor (G): Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar kedua dan ketiga, dengan rata-rata 6,35% dan 4,12% selama tahun 2019-2023. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, terdapat penurunan kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2023.

B. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresetasikan Kemampuan daerah dalam bersaing secara nasional ataupun Global. IDSD akan mengukur bagaimana produktivitas suatu daerah. IDSD akan menjadi tolak ukur sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing global yang lebih luas.

Tabel 2.32
Jumlah Kabupaten yang Memiliki Fasilitas Akses Kesehatan 2023-2024

Kabupaten	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu/Pustu
Nabire	1	-	32	20	131
Mimika	7	1	26	8	196
Paniai	1	-	31	1	74
Puncak Jaya	1	-	16	-	17
Dogiyai	1	1	15	-	79
Deiyai	1	-	10	-	7
Puncak	1	-	17	-	14
Intan Jaya	1	-	6	2	78
Papua Tengah	14	2	153	31	596

Sumber Data : Dinas Kesehatan Prov Papua Tengah, 2024 (data diolah)

IDSD jika dilihat dari jumlah Kabupaten yang memiliki Sarana Kesehatan terbagi dalam beberapa kategori. Dari 8 (delapan) kabupaten yang memiliki Rumah sakit terdapat 3 (tiga) rumah sakit Type C dan 5 (lima) Rumah sakit Type D yang berjalan pada tahun 2024.

2.3.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.2.1 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di provinsi Papua Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2023 yang dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.33 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Nabire	9.195	8.840	8.856	9.040	9.381
Mimika	12.035	11.431	11.400	11.647	12.076
Puncak Jaya	5.523	5.282	5.289	5.422	5.731
Intan Jaya	5.293	5.293	5.293	5.624	6.140
Paniai	6.767	6.361	6.377	6.554	6.977
Deiyai	4.958	4.632	4.673	4.808	5.104
Dogiyai	5.709	5.373	5.415	5.705	6.182
Puncak	5.702	5.378	5.412	5.583	5.975
Papua Tengah	6.935	6.573	6.594	6.798	7.196

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada beberapa kabupaten dalam jangka waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Penurunan terjadi dari tahun 2019 menuju 2020, kemudian cenderung mengalami Peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Angka tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 7.196. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.2 Sarana Transportasi

Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun Resiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk lebih mudah dan

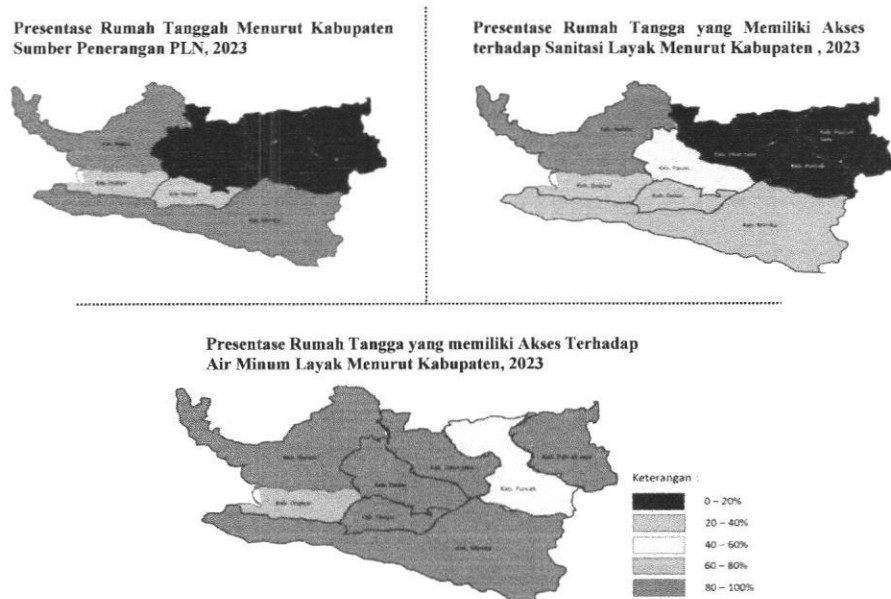
sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.

2.3.2.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan akses internet merupakan indikator dasar yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Dalam Gambar 2.3.3 tersaji persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap listrik (>80%), hanya kabupaten Puncak yang masih terkendala pada akses listrik (40-60%).

Gambar 2.3. 1 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi Provinsi Papua



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Papua Tengah 2023, data diolah

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 34 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2022

No	Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)								
		7-12 Tahun			13-15 Tahun			16-18 Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
1	Nabire	94,63	94,61	94,37	94,41	94,38	95,51	80,04	77,22	83,36
2	Paniai	84,02	84,07	83,12	79,82	80,88	80,17	46,62	47,56	46,56
3	Puncak Jaya	77,59	77,26	75,67	65,77	65,57	65,97	39,53	32,94	37,65
4	Mimika	94,16	95,58	95,56	95,28	95,17	94,75	81,79	72,2	84,63
5	Puncak	52,21	52,22	51,61	30,44	32,43	31,98	28,2	22,55	27,71
6	Dogiyai	85,9	85,88	85,59	84,6	83,44	83,84	57,17	65,16	65,82
7	Intan Jaya	61,92	61,45	60,96	53,27	52,79	52,34	45,91	38,8	45,1
8	Deiyai	63,78	65,82	65,35	58,85	60,05	59,52	56	53,25	46,26
Papua Tengah		76,78	77,11	76,53	70,31	70,59	70,51	54,41	51,21	54,64

Sumber : BPS Provinsi Papua

2. Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari tahun 2019 sampai 2022. Jumlah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika merupakan wilayah yang memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah dengan jumlah 83 SD, 38 SMP dan 26 SMA pada tahun 2021. Untuk lebih jelas mengenai rincian jumlah fasilitas sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35 Jumlah Fasilitas Sekolah di Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten

No	Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK			Perguruan Tinggi		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17
1	Nabire	74	76	73	35	35	37	31	30	26	7	6	8
2	Paniai	86	84	72	15	14	10	12	12	11	-	-	-
3	Puncak Jaya	26	26	26	8	7	6	5	5	8	-	-	-
4	Mimika	86	87	83	40	39	38	26	26	26	8	7	6
5	Puncak	44	44	38	8	8	8	3	3	3	-	-	-
6	Dogiyai	51	54	47	11	10	10	6	5	4	1	1	1
7	Intan Jaya	23	23	31	6	6	6	2	2	2	-	-	-
8	Deiyai	35	35	34	7	7	9	4	4	4	-	-	-
Papua Tengah		425	429	404	130	126	124	89	87	84	16	14	15

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022,

3. Perkembangan Guru dan Murid

Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022. Pada Tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 14.836 dan mengalami penurunan menjadi 14.769 pada Tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan guru di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Perkembangan Guru di Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Negeri		Swasta		Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	3.256	3.095	2.206	2.021	5.462	5.116
2	Puncak Jaya	717	620	16	18	733	638
3	Paniai	1.391	1.425	797	628	2.188	2.053
4	Mimika	3.068	3.102	1.385	1.474	4.453	4.576
5	Puncak	442	406	34	34	476	440
6	Dogiyai	417	516	283	312	700	828
7	Intan Jaya	62	55	62	65	124	120
8	Deiyai	622	786	78	212	700	998
Papua Tengah		9.975	10.005	4.861	4.764	14.836	14.769

Sumber : Sumber : BPS Provinsi Papua 2022,

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020/2021 jumlah guru yang tersedia di Provinsi Papua Tengah mencapai 10.754 dan mengalami peningkatan menjadi 11.094 pada tahun 2021/2022. Untuk lebih jelas mengenai rincian perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Perkembangan Murid di Provinsi Papua Tengah Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Negeri		Swasta		Total	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nabire	2.019	1.945	1.145	1.017	3.164	2.962
2	Paniai	269	343	847	855	1.116	1.198
3	Puncak Jaya	237	324	0	0	237	324
4	Paniai	269	343	847	855	1.116	1.198
5	Mimika	2.314	2.365	3.137	3.151	5.451	5.516
6	Puncak	74	46	34	34	108	80
7	Dogiyai	98	157	331	350	429	507
8	Intan Jaya	62	55	0	0	62	55
Papua Tengah		5.162	5.325	5.592	5.769	10.754	11.094

Sumber : BPS Provinsi Papua 2022, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua Tengah 2024

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2. 38 Angka Kematian Bayi Tahun 2020

No	Kabupaten	Angka Kematian Bayi		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 1000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	68	3.372	20,2
2	Puncak Jaya	0	532	0,0
3	Paniai	5	0	0,0
4	Mimika	11	2.821	3,9
5	Puncak	0	206	0,0
6	Dogiyai	14	1.099	12,7
7	Intan Jaya	0	86	0,0
8	Deiyai	0	0	0
Papua Tengah		98	8.116	12,07

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua Tengah merupakan akumulasi dari 8 kabupaten/kota.

2. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan

karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Tabel 2. 39 Angka Kematian Ibu Tahun 2020

No.	Kabupaten	Angka Kematian Ibu		
		Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Per 100.000 KH
1	2	3	4	5
1	Nabire	4	3.372	119
2	Puncak Jaya	2	532	376
3	Paniai	2	0	0
4	Mimika	2	2.821	71
5	Puncak	0	206	0
6	Dogiyai	6	1.099	546
7	Intan Jaya	1	86	1.163
8	Deiyai	0	0	0
Papua Tengah		17	8.116	209

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2020

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka kematian ibu mencapai angka 209.

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

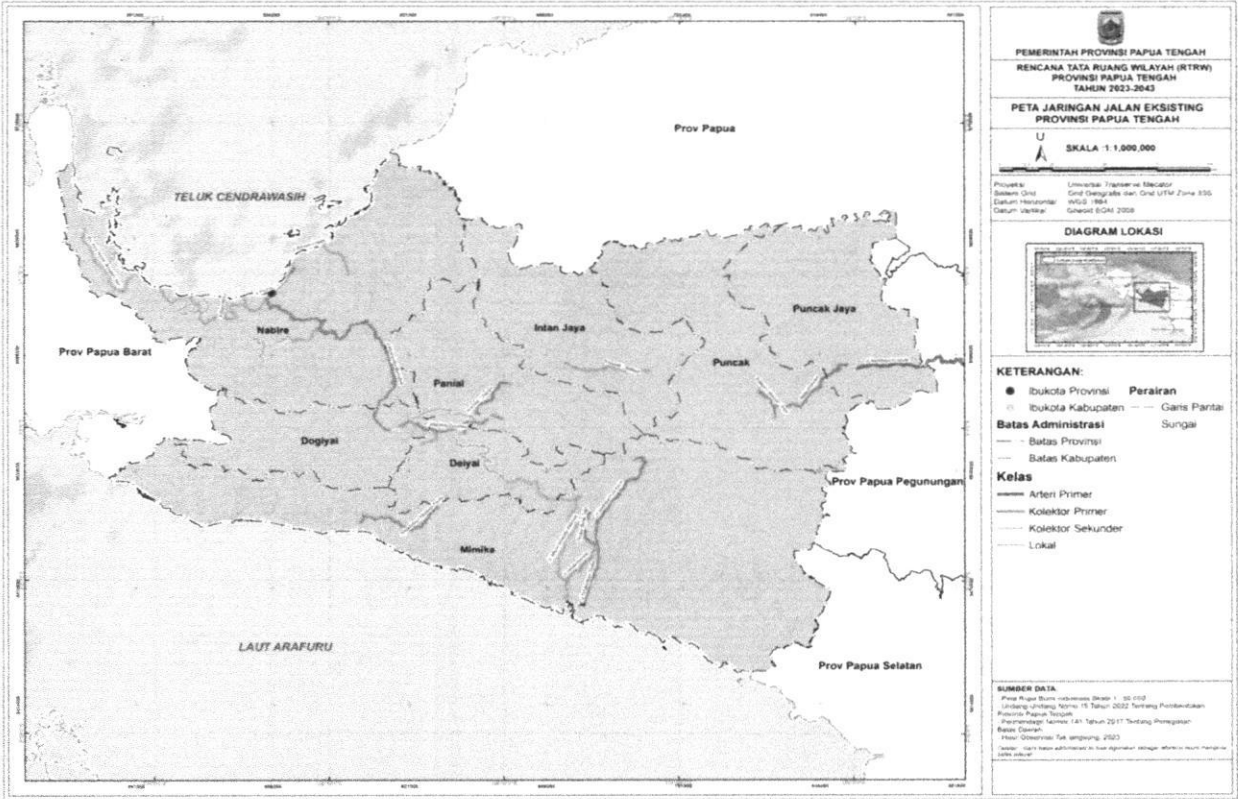
- Jaringan Jalan

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Provinsi Papua Tengah terdapat pada Kabupaten Mimika dengan total 162,1 km (35,9%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Dogiyai merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua Tengah dengan 8 km (1,77%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Panjang Jalan di Provinsi Papua Tengah (km)

No	Kab/Kota	Provinsi	Aspal	Lainnya
1	2	3	4	5
1	Nabire	Papua Tengah	832,9	53
2	Paniai	Papua Tengah	280,9	12,1
3	Puncak Jaya	Papua Tengah	11,61	261,5
4	Mimika	Papua Tengah	765,10	134,8
5	Puncak	Papua Tengah	392	27,29
6	Dogiyai	Papua Tengah	0	8
7	Intan Jaya	Papua Tengah	19,603	275,69
8	Deiyai	Papua Tengah	0	72,5

Sumber : BPS Provinsi Papua,2023



Gambar 2.4.1 Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Tengah

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah semenjak tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 2.165 unit.

Adapun jumlah rumah layak huni selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.41 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua Tengah 2018-2022

No	Kabupaten	Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Nabire	152	148	148	10	-	500
2	Puncak Jaya	27	54	42	18	37	203
3	Paniai	40	38	35	15	10	138
4	Mimika	90	359	292	117	18	933
5	Puncak	-	-	-	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-	-	-	-
7	Intan Jaya	32	68	8	165	11	331
8	Deiyai	-	-	-	60	-	60
Papua Tengah		341	667	525	385	76	2.165

*Sumber : Dinas Perumahan dan Dinsos Kabupaten Lingkup
Provinsi Papua Tengah, 2022*

2.4.1.5 Urusan Ketenteraman Perlindungan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya.

Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengamanan di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban

serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Jumlah Polisi Pamong Praja per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah 2020-2022

No	Kabupaten	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Nabire	-	-	113
2	Puncak Jaya	-	-	35
3	Paniai	-	-	25
4	Mimika	-	-	-
5	Puncak	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-
7	Intan Jaya	30	32	29
8	Deiyai	-	-	-
Papua Tengah		30	32	202

Sumber : Bps Provinsi Papua, 2023

2.4.1.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua.

Hal Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

2.4.1.7 Keagamaan

- Tempat Ibadah
Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua Tengah cenderung terjadi peningkatan sepanjang tahun 2018-2022. Tercatat

sampai dengan tahun 2022 rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk adalah sebesar 18,31 unit. Artinya 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 18 unit tempat ibadah. Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah ibadah di 8 kabupaten/kota sepanjang tahun 2018-2022 sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43 Rasio Tempat Ibadah Per 10.000 Penduduk Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Provinsi	Wilayah Adat	Tahun		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	Papua Tengah	Mee Pago	28,33	27,88	38,74
2	Paniai	Papua Tengah	Mee Pago	14,07	13,75	10,53
3	Puncak Jaya	Papua Tengah	La Pago	19,35	18,87	27,97
4	Mimika	Papua Tengah	Mee Pago	12,85	12,61	18,51
5	Puncak	Papua Tengah	La Pago	1,89	1,86	22,37
6	Dogiyai	Papua Tengah	Mee Pago	14,7	14,5	9,37
7	Intan Jaya	Papua Tengah	Mee Pago	1,64	1,62	10,87
8	Deiyai	Papua Tengah	Mee Pago	11,86	11,75	8,18

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

Tabel 2. 44 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten

No	Kabupaten	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua				
		Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
		2020	2020	2020	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Nabire	202	328	52	7	3
2	Paniai	13	125	52	-	-
3	Puncak Jaya	2	370	2	-	-
4	Mimika	134	207	70	1	2
5	Puncak	2	251	5	-	-
6	Dogiyai	1	81	11	-	-
7	Intan Jaya	1	52	2	-	-
8	Deiyai	1	42	18	-	-
Provinsi Papua		356	1.456	212	8	5

Sumber: BPS Provinsi Papua (Kementerian Agama Provinsi Papua)

2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Urusan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), prosentase kesempatan kerja, prosentase angkatan kerja yang kerja serta distribusi lapangan pekerjaan merupakan gambaran yang bermanfaat untuk melihat prospek ekonomi suatu daerah. TPAK merupakan rasio antara banyaknya penduduk angkatan kerja dengan banyaknya Penduduk usia kerja. Hal ini menggambarkan banyaknya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik itu dengan bekerja ataupun mencari kerja.

Tabel 2. 45 Tingkat Partisipasi Angka Kerja Tahun 2020-2022

No	Kabupaten	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK (%)	TPT (%)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Nabire	78.857	75.658	3.199	35.176	69,15	6,65
2	Puncak Jaya	167.950	166.724	1.226	27.949	85,73	1,74
3	Paniai	127.259	125.667	N/A	53.731	70,31	0,66
4	Mimika	145.828	139.995	5.833	73.047	66,63	5,35
5	Puncak	89.265	89.054	N/A	6.338	93,37	0,94
6	Dogiyai	80.269	78.347	N/A	9.501	89,42	0,21
7	Intan Jaya	94.091	91.062	N/A	19.560	82,79	0,00
8	Deiyai	51.421	50.662	N/A	23.350	86,77	0,79
Papua Tengah		834.940	817.169	10.258	248.652	80.52	2,48

Sumber : BPS Provinsi Papua, ,Papua Tengah Dalam Angka PPT 2024

2. Angkatan Kerja Aparatur Sipil Negara

Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Tengah mencapai 8.116 jiwa atau sebesar 39,9% dari seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan jumlah pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.629 atau sebesar 32% pegawai negeri sipil perempuan berasal dari Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten	PNS (Jenis Kelamin)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Nabire	2.377	1.968	4.345
2	Puncak Jaya	1.665	612	2.277
3	Paniai	1.577	688	2.265
4	Mimika	1.995	2.629	4.624
5	Puncak	1.427	490	1.917
6	Dogiyai	1.258	585	1.843
7	Intan Jaya	910	585	1.495
8	Deiyai	1.014	559	1.573
Papua Tengah		12.223	8.116	20.339

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi proses registrasi penduduk, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan proses administrasi lainnya yang berkaitan dengan data kependudukan. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki tujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki identitas resmi yang sah dan memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan publik serta menjalankan fungsi pemerintahan lainnya. Adapun Data Kependudukan pada Provinsi Papua Tengah Khusus Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan table di bawah ini:

Tabel 2.47
Jumlah Penduduk Orang Asli Papua Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Nabire	58.054	51.394	109.448
2	Puncak Jaya	111.944	96.247	208.191
3	Paniai	66.314	54.267	120.581
4	Mimika	107.000	92.345	199.345
5	Puncak	90.393	80.573	170.966
6	Dogiyai	59.839	54.823	114.662
7	Intan Jaya	66.935	59.903	126.838
8	Deiyai	47.843	42.397	90.240
Papua Tengah		608.322	531.949	1.140.271

Sumber Data : Dinas Dukcapil Prov Papua Tengah, 2024 (data diolah)

4. Urusan Perhubungan

Sektor transportasi merupakan salah satu jaringan distribusi barang dan orang/ penumpang yang berkembang sangat dinamis. Selain itu, sektor transportasi juga berperan di dalam mendukung, mendorong serta menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis. Keberhasilan sektor transportasi dapat dilihat dalam kapasitas yang tersedia, kualitas layanan, aksesibilitas, keterjangkauan beban publik, dan utilisasi. Sistem jaringan transportasi di Provinsi Papua Tengah dibagi menjadi jaringan jalan, terminal, jalan rel, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan transportasi laut, dan bandar udara.

A. Transportasi Darat

- Jalan

Jaringan jalan memiliki keterkaitan yang menunjang tercapainya struktur tata ruang suatu wilayah untuk mendukung kegiatan secara optimal sesuai dengan hierarkinya. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang

seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Sedangkan kondisi jaringan jalan Provinsi Papua Tengah masih mengacu pada sumber Rencana pengembangan jaringan jalan di Provinsi Papua dalam RTRW Provinsi induk Papua tahun 2013, dan sistem jaringan jalan strategis Nasional dan jalan nasional. Jaringan jalan yang terdapat di Provinsi Papua Tengah berdasarkan data RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 yaitu :

1. Jalan Nasional

- a. Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura – Sarmi – Mamberamo Raya – Waropen - Nabire;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Kimibay-Batas Kota Nabire
- c. Jaringan Jalan Arteri Primer Timika – Waghete- Enarotali
- d. Jaringan jalan Arteri primer Wamena – Karubaga - Mulia

2. Jalan Provinsi

- a. Jaringan jalan kolektor primer Nabire – Waghete - Enarotali;
- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Enarotali – Sugapa.

- Rel Kereta Api

Transportasi jalan rel terdiri dari jaringan prasarana, sarana transportasi kereta, dan simpul transportasi kereta api. Hingga saat ini transportasi jaringan jalan rel belum tersedia di wilayah Provinsi Papua. Padahal potensi moda kereta api ini lebih baik daripada moda transportasi darat lainnya dari sisi kapasitas angkut yang lebih banyak, baik untuk barang maupun penumpang, jarak tempuh yang cukup jauh, dengan biaya transportasi yang relatif lebih murah, dan tingkat polusi yang rendah. Pada kondisi *eksisting*, jalur kereta api masih belum tersedia, namun berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033 terdapat rencana pengembangan jaringan pelayanan transportasi kereta api di Provinsi Papua Tengah adalah:

- a. Lintas Jayapura-Sami-Nabire
- b. Lintas Nabire-Manokwari-Sorong
- c. Lintas Nabire-Timika

Sedangkan arahan pengembangan simpul transportasi kereta api berupa stasiun di kota pusat pertumbuhan, atau pusat produksi barang yang dilalui jalan rel yaitu:

Tabel 2.48 Arahan pengembangan Simpul Transportasi Kereta Api di Provinsi Papua

No	Rute	Lokasi Kabupaten	Lokasi Stasiun
1	Jayapura-Sarmi-Nabire	Kota/Kab. Jayapura-Sarmi-Mamberamo Raya-Waropen-Nabire.	Jayapura, Depapre, Sarmi, Trimuris, Botawa, Nabire.
2	Nabire-Manokwari (Papua Barat)	Nabire-Papua Barat	Nabire
3	Nabire-Timika	Nabire-Dogiyai-Deiyai-Paniai-Mimika.	Nabire, Moanamani, Waghete, Enarotali, Timika, Pomako.

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

- Terminal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi. Sedangkan terminal penumpang tipe B merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi. Lokasi terminal penumpang tipe A memiliki kriteria sebagai berikut:

- Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan
- Terletak dalam jaringan trayek antarkota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara atau rencana pengembangan jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara

Lokasi terminal penumpang tipe B memiliki kriteria sebagai berikut:

- Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan
- Terletak dalam jaringan trayek antarkota dalam provinsi

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033, lokasi dan tipe terminal di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A

- a. Terminal Nabire – Kabupaten Nabire

2. Terminal Tipe B

- a. Terminal Oyehe – Kabupaten Nabire

- b. Terminal Mulia – Kabupaten Puncak Jaya
- c. Terminal Timika – Kabupaten Mimika
- d. Terminal Wagete – Kabupaten Deiyai
- e. Terminal Enarotali – Kabupaten Paniai
- f. Terminal Waghete – Kabupaten Deiyai

B. Transportasi Udara

A. Bandar Udara

Berdasarkan pada hierarki, bandar udara merupakan pusat pelayanan yang terdiri atas:

1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
2. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
3. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier: adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
4. Bandar udara pengumpan merupakan Bandar udara tujuan atau penunjang bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal

Di Provinsi Papua Tengah, pengembangan bandara pengumpul dengan skala pelayanan tersier tahun 2013-2033 dilakukan pada:

- a. Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire;
- b. Bandar Udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika;

Rencana pengembangan bandara pengumpan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2013-2033.

5. Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Layanan telekomunikasi dapat diindikasikan dari penerimaan sinyal internet telepon seluler.

Tabel 2.50 Banyaknya Desa/Kampung menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Papua Tengah, 2021

Kabupaten	4G/LTE	3G/H/H+/ EVDO	2,5G/E/ GPRS	None
Nabire	29	5	13	8
Paniai	–	1	25	91
Puncak Jaya	8	12	20	75
Mimika	53	7	–	6
Puncak	–	1	–	52
Dogiyai	–	2	19	14
Intan Jaya	–	–	–	16
Deiyai	3	1	4	40
Jumlah	930	228	360	938

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa layanan telekomunikasi yang memadai dengan sinyal 4G/LTE hanya terdapat di beberapa kabupaten di antaranya Mimika, Nabire, dan Puncak Jaya. Sedangkan di kabupaten lainnya, masih cukup banyak kampung yang belum terlayani koneksi internet yang memadai.

2.4.3 Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah akomodasi sebanyak 34 unit, 735 kamar dan 1770 tempat tidur yang tersebar pada Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai dan Mimika pada tahun 2020. Kabupaten Nabire merupakan wilayah yang paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang pariwisata.

Tabel 2. 51 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada
Provinsi Papua Tengah Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur	Akomodasi	Kamar	Tempat Tidur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nabire	22	456	521	23	475	663	23	501	720
2	Puncak Jaya	1	9	9	1	19	18	1	26	40
3	Paniai	3	27	47	3	28	47	3	26	44
4	Mimika	6	497	816	7	659	975	7	182	966
5	Puncak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dogiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Intan Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Deiyai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023

2. Urusan Pertanian

Produksi komoditas di Provinsi Papua Tengah paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua Tengah mencapai 7.356,28 Ton dan produksi padi setara beras mencapai 4.178,72 Ton. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupten Nabire. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian produksi komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Produksi Komoditas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Produksi Padi (Ton GKG)	Produksi Padi Setara Beras (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)	Produksi Kopi (Ton)
1	2	3	4	5	6	
1	Nabire	7.312,00	4.153,56	991,00	725,00	
2	Puncak Jaya	-	-	-	-	
3	Paniai	-	-	346,00	113,00	
4	Mimika	44,28	25,16	128,00	106,00	
5	Puncak	-	-	182,00	-	
6	Dogiyai	-	-	-	-	
7	Intan Jaya	-	-	-	-	
8	Deiyai	-	-	-	-	
Jumlah		7.356,28	4.178,72	1.647,00	944,00	

Sumber : BPS Prov Papua, 2023

3. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Pasar sebagai salah satu sarana distribusi mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik bagi produsen, pelaku kegiatan perdagangan, maupun konsumen. Selain pasar, terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti swalayan, warung, dan toko.

Sarana perdagangan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari pasar tradisional, swalayan, dan warung/toko. Pada tahun 2022 tercatat bahwa jumlah pasar terbanyak berada di Kabupaten Nabire dengan jumlah 36 unit. Namun demikian, jumlah total sarana perdagangan yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 5.652 unit.

Tabel 2.53 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2023

No	Kabupaten	Pasar	Swalayan	Warung/Toko
1	2	3	4	5
1	Nabire	36	15	1.515
2	Puncak Jaya	-	-	-
3	Paniai	-	-	-
4	Mimika	16	50	5.586
5	Puncak	5	2	-
6	Dogiyai	14	16	-
7	Intan Jaya	4	-	-
8	Deiyai	1	-	117
Jumlah		76	83	7.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 RTRW papua Tengah 2023-2024 **
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Papua

Sesuai dengan Arah dari SE Mendagri Nomor 600.2.1/1570/Sj evaluasi hasil RPJPD dilakukan pada indikator kinerja sasaran pokok daerah, dengan menilai tingkat capaian masing-masing indikator yang dikategorikan dalam 5 (lima) kriteria yaitu sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rencah, dan Sangat rendah.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Dokumen RPJPD Provinsi papua maka dapat disampaikan hasil evaluasi sasaran pokok RPJP 2025-2045 Provinsi Papua pad tabel Sebagai Berikut :

2.5.1 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Kesejahteraan

Jumlah indikator kinerja yang telah dirumuskan untuk mewujudkan sasaran pokok pertama, Peningkatan Kesejahteraan, sebanyak 9 (lima) indikator, dengan rasio capaian kinerjanya masing-masing untuk periode 1, periode 2 dan periode sebagai berikut.

Tabel 2.54 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Kesejahteraan (dalam %)

Indikator Sasaran		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	IPM	84,24	85,80	81,85	83,97	Tinggi
2	AMH	100,01	99,73	101,49	100,41	Sangat tinggi
3	Umur Harapan Hidup	91,71	90,75	97,37	93,28	Sangat tinggi
4	Penolong Kelahiran dengan Tenaga Medis	95,89	118,08	114,26	109,41	Sangat Tinggi
5	Rata-rata lama sekolah	83,58	81,50	70,20	78,43	Tinggi
6	AKB per 1000 kelahiran hidup	7,14	158,30	164,72	110,05	Sangat tinggi
7	AKI per 100.000 kelahiran hidup	0,00	34,02	98,08	44,03	Sangat rendah
8	Presentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+	78,52	84,88	78,94	80,78	Tinggi
9	Presentase Penduduk Miskin (2011)	90,67	73,91	21,33	61,97	Rencah

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Prov Papua.

Jika mengamati pada rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator kinerja selama 3 periode RPJPD, terlihat jelas ada 2 (dua) indikator yang “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai nilai 100% sampai akhir periode RPJPD (Periode ke-4). Masing-masing adalah AKI (Angka Kematian Ibu) per 1000 kelahiran hidup dengan rata-rata nilai capaian sebesar 44,03%, dan Persentase Penduduk Miskin sebesar 61,97%. Sedangkan capaian indikator kinerja lainnya ada yang terindikasi “Akan Tercapai” pada akhir periode RPJPD yaitu IPM sebesar 83,97%, Umur harapan Hidup sebesar 93,28%, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 78,43%, dan Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+ sebesar 80,78%. Serta yang terindikasi akan “Melampaui” yaitu indikator AMH sebesar 100,41%, Penolong Kelahiran Dengan Tenaga medis sebesar 109,41%, dan AKB per 1000 kelahiran hidup sebesar 110,05%.

2.5.2 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah

Ada 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dirumuskan untuk mewujudkan sasaran pokok ke-2, Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah. Berdasarkan evaluasi hasil RPJPD, untuk sasaran ini hanya ada 1 (satu) indikator saja yang mendapat kriteria Rendah, yakni Persentase Rumah Sehat dengan rata-rata nilai capaian selama 3 periode sebesar 60,04%, sehingga diperlukan “Upaya Keras” untuk mencapai nilai 100% di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.55 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah (dalam %)

Indikator Sasaran		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Laju Pertumbuhan PDRB Non Tambang	142,43	98,57	29,14	90,05	Sangat Tinggi
2	Gini Ratio	131,50	98,95	87,71	106,05	Sangat Tinggi
3	Produksi Padi	103,00	91,94	80,19	91,71	Sangat Tinggi
4	Produksi Ubi Jalar	100,55	126,36	120,08	115,66	Sangat Tinggi
5	Produksi Ubi Kayu	102,38	156,10	136,77	131,75	Sangat Tinggi
6	Produksi Jagung	102,86	117,73	145,90	122,16	Sangat Tinggi

7	Perikanan	117,04	87,39	82,84	95,76	Sangat Tinggi
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100,51	99,38	85,31	95,07	Sangat tinggi
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	71,28	80,00	86,80	79,36	Tinggi
10	Presentase Rumah Sehat	-	83,90	36,18	60,04	Rendah

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Prov Papua.

Adapun indikator lainnya termasuk dalam kriteria Tinggi dan Sangat Tinggi, dimana untuk yang tergolong dengan kriteria Sangat Tinggi ada yang terindikasi akan “Melampaui” target RPJPD di akhir periode, yaitu capaian indikator Gini Ratio dengan rata-rata nilai capaian sebesar 106,05%, Produksi Ubi Jalar sebesar 115,66%, Produksi Ubi Kayu sebesar 131,75%, dan Produksi Jagung sebesar 122,16%.

2.5.3 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Pelayanan Umum

Pada sasaran pokok ke-3 yaitu Peningkatan Pelayanan Umum terdapat 15 indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam RPJPD, yang mana sampai dengan periode ke-3 RPJPD ada 5 (lima) indikator dengan rata-rata nilai capaiannya dibawah 75% (masuk kriteria Sedang, Rendah dan Sangat Rendah) yaitu Rasio Murid SMP Terhadap Guru dengan nilai rata-rata sebesar 72,38%, Rasio Guru SD Terhadap Sekolah sebesar 71,46%, Rasio Murid SMA/MA Terhadap Guru sebesar 65,38%, Rumah Sehat sebesar 60,04%, Rasio Perawat Terhadap Penduduk sebesar 2,14%. Ini berarti ke-5 indikator tersebut “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai nilai rata-rata 100% di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.56 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Pelayanan Umum (dalam %)

Indikator Sasaran		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Rasio Elektrifikasi	109,86	164,75	159,92	144,84	Sangat Tinggi
2	Rasio Guru SD Terhadap sekolah	75,00	66,67	72,73	71,46	Sedang
3	Rasio Murid SD Terhadap Ruang Belajar	96,77	77,14	86,67	86,86	Tinggi

4	Rasio murid SD Terhadap guru	100	87,50	76,67	88,06	Tinggi
5	Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah	100	120	108,33	109,44	Sangat Tinggi
6	Rasio Murid SMP Terhadap Ruang Belajar	93,80	80,00	82,86	85,55	Tinggi
7	Rasio Murid SMP terhadap Guru	103.14	64.00	50.00	72.38	Sedang
8	Rasio Guru SMA/MA Terhadap Sekolah	100.00	111.76	95.00	102.25	Sangat tinggi
9	Rasio Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar	106.67	85.71	80.00	90.79	Sangat Tinggi
10	Rasio Murid SMA/MA Terhadap guru	89.47	60.00	46.67	65.38	Sedang
11	Rasio Dokter Terhadap Penduduk	97.39	67.24	103.30	89.31	Tinggi
12	Rasio Bidan terhadap penduduk	108.32	141.70	146.89	132.30	Sangat tinggi
13	Rasio Perawat terhadap penduduk	0.00	6.43	0.00	2.14	Sangat rendah
14	Proporsi Akses Air Bersih	112.66	112.68	71.54	98.96	Sangat Tinggi
15	Persentase Rumah Sakit	-	83.90	36.18	60.04	Rendah

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Prov Papua.

Sedangkan 10 indikator kinerja sasaran lainnya memiliki kriteria Tinggi dan Sangat Tinggi, dimana 5 (lima) diantaranya terindikasi akan “Melampaui” target diakhir periode RPJPD, yaitu indikator Rasio Elektrifikasi dengan nilai rata-rata capaian sebesar 144,84%, Rasio Bidan Terhadap Penduduk sebesar 132,30%, Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah sebesar 109,44%, dan Rasio Guru SMA/MA Terhadap Sekolah sebesar 102,25%. Indikator kinerja lainnya terkategori “Akan Tercapai” di akhir periode RPJPD, antara lain Proporsi Akses

Air Bersih, Rasio Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar, Rasio Dokter Terhadap Penduduk, dan Rasio Murid SD Terhadap Guru.

2.5.4 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Untuk sasaran ke-4, yaitu Peningkatan Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur, telah dirumuskan 12 indikator kinerja yang ditargetkan sampai akhir periode RPJPD. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja, terutama dilihat dari rata-rata selama 3 periode, terindikasi ada 2 (dua) indikator kinerja yang memiliki nilai dibawah 75%, sehingga terkategori “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai angka 100% di akhir periode ke-4. Indikator kinerja yang dimaksud adalah Area Penggunaan Lain dengan nilai rata-rata tingkat pencapaian sebesar 73,87%, dan Akses Air Bersih sebesar 63,98%.

Tabel 2.57 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Fasilitas Wilayah / Infrastruktur (dalam %)

Indikator Sasaran		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Panjang Jalan Nasional	148.03	175.80	173.63	165.82	Sangat Tinggi
2	Panjang Jalan Provinsi	24.98	33.74	29.53	29.42	Sangat Rendah
3	Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan	453.82	313.41	380.13	382.45	Sangat Tinggi
4	Jumlah Barang di bongkar melalui Pelabuhan udara	-	163.27	85.13	124.20	Sangat tinggi
5	Jumlah Barang dimuat melalui Pelabuhan udara	-	151.53	10.77	81.15	Tinggi
6	Jumlah Barang antar pulau dibongkar melalui Pelabuhan laut	54.51	100.78	-	77.64	Tinggi
7	Jumlah Barang antar pulau dimuat melalui Pelabuhan laut	67.25	89.31	-	78.28	Tinggi

8	Akses air bersih	65.72	75.12	51.10	63.98	Rendah
9	Luas Kawasan Hutan	102.14	97.65	97.25	99.01	Sangat Tinggi
10	Persentase Luas Hutan Lindung	42.67	41.89	43.89	42.82	Sangat Rendah
11	Persentase Luas Hutan Produksi	143.13	145.52	140.57	143.07	Sangat Tinggi
12	Area Penggunaan lainnya	83.81	67.00	70.81	73.87	Sedang

Sumber data: Hasil Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025 Prov Papua.

2.5.5 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Iklim Berinvestasi

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditargetkan dalam sasaran pokok RPJPD Peningkatan Iklim Berinvestasi. Dari ke-6 indikator tersebut hanya satu indikator saja yang dinilai capaiannya masih dibawah 75%, yaitu Realisasi nilai investasi PMDN, dengan rata-rata nilai capaian sebesar 16,79%, sehingga terindikasi indikator tersebut dikategorikan “Perlu Upaya Keras” untuk mencapai 100% di akhir periode RPJPD. Sedangkan untuk indikator yang terkategori “Akan Tercapai” adalah Jumlah Proyek PMA dengan rata-rata nilai capaian sebesar 75,08%. Indikator lainnya, yaitu Jumlah Proyek PMDN (364,35%), Jumlah Unit Bank (176,67%), Total Investasi (111,99%), dan Realisasi nilai investasi PMA (106,34%), semuanya tergolong akan “Melampaui” target di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.58 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Iklim Berinvestasi (dalam %)

Indikator Sasaran		Periode 1	Periode 2	Periode 3	Rata-rata	Kriteria
1	Jumlah Proyek PMDN	41.38	49.25		1002.41	Sangat Tinggi
2	Jumlah Proyek PMA	45.57	106.12		73.54	Sedang
3	Realisasi nilai Investasi PMDN	35.60	1.68		13.08	Sangat Rendah
4	Realisasi nilai Investasi PMA	107.77	110.94		100.30	Sangat Tinggi
5	Total Investasi	124.63	110.68		100.65	Sangat tinggi
6	Jumlah Unit Bank	118.23	200.95		210.83	Sangat tinggi

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Prov Papua 2005-2025, 2023

2.5.6 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pokok

Maksud dari penyajian hasil rekapitulasi ini adalah untuk mengamati sejauhmana arah capaian dari masing-masing sasaran pokok RPJPD, ada 5 (lima) sasaran pokok, sampai periode akhir. Apakah akan terwujud atau tidak ? selain itu juga sekaligus untuk menunjukkan rata-rata total nilai capaian kinerja jika dilihat secara keseluruhan per periode, terutama periode 1, periode 2, dan periode 3.

Tabel 2.59 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok RPJPD (dalam %)

Sasaran Pokok Daerah	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Akhir Periode
Peningkatan Kesejahteraan	70,20	91,89	92,03	Akan Terwujud
Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	107,95	104,03	89,09	Akan Terwujud
Peningkatan Pelayanan Umum	92,36	88,63	81,12	Akan Terwujud
Peningkatan Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	118,60	121,25	108,28	Akan Terwujud
Peningkatan Iklim Berinvestasi	124,63	110,68	100,65	Akan Terwujud
Rata-rata Total	94,91	100,60	110,39	
Kriteria	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Prov Papua 2005-2025, 2023

Jika melihat hasil perhitungan rata-rata nilai capaian kinerja untuk setiap sasaran pokok selama 3 periode berjalan ini, adalah suatu keniscayaan bila pemerintah provinsi merasa optimis bahwa semua sasaran pokok yang telah ditargetkan pada RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 akan terwujud semuanya pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti misi yang dilaksanakan selama periode 2005-2022, dipastikan mampu mewujudkan visi RPJPD yaitu Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Politik. Kondisi ini juga diindikasikan dengan capaian kinerja seluruh sasaran pokok daerah yang mendapat label kriteria “Sangat Tinggi” pada setiap periode. Bahkan di periode 2 dan periode 3 nilai rata-rata capaian kinerja dapat melampaui angka 100%.

Namun begitu, pemerintah provinsi tidak boleh lalai dan mengabaikan beberapa indikator kinerja sasaran yang hasilnya selama 17 tahun pembangunan jangka panjang ini (2005-2022) masih mendapat nilai kinerja dibawah 65% dengan kriteria Rendah dan Sangat Rendah, seperti jumlah penduduk miskin, kepemilikan rumah layak huni, jumlah tenaga perawat, dan nilai investasi PMDN yang direalisasikan. Terhadap indikator- indikator ini, perlu dibuatkan kebijakan strategis yang super prioritas dan inovatif, agar dalam pembangunan jangka pendek dan jangka menengah kedepan dapat dikoreksi secepat mungkin dan capaiannya dapat maksimal, sehingga secara utuh seluruh sasaran pokok dapat mewujudkan visi dan misi RPJPD Provinsi Papua diakhir tahun 2025.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Pada sub bab proyeksi kependudukan akan menguraikan hasil analisis dari proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kabupaten, jenis kelamin, dan kelompok usia.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk merupakan hasil estimasi perkembangan penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, didasarkan pada data populasi tahun-tahun sebelumnya dan faktor-faktor demografis yang relevan. Tabel 2.60 berikut memberikan gambaran tentang bagaimana jumlah penduduk diperkirakan akan berkembang, memberikan landasan penting untuk perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Dengan memahami tren proyeksi ini, dapat mempermudah dalam mempersiapkan untuk menghadapi perubahan demografis dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukung kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Tabel 2.60 Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nabire	174.375	177.040	183.856	190.935	198.286	205.919
2	Paniai	229.606	234.311	246.437	259.190	272.604	286.712
3	Puncak Jaya	233.895	238.687	251.040	264.032	277.697	292.069
4	Mimika	324.987	331.646	348.811	366.864	385.852	405.823
5	Dogiyai	121.055	123.536	129.931	136.656	143.729	151.169
6	Intan Jaya	140.677	143.559	150.988	158.802	167.020	175.663
7	Deiyai	103.226	105.341	110.792	116.526	122.557	128.900
8	Puncak	116.799	117.838	120.470	123.161	125.913	128.726
Total		1.444.620	1.471.958	1.542.325	1.616.167	1.693.657	1.774.980

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 diperkirakan sebesar 1.774.980 jiwa. Jumlah proyeksi penduduk tertinggi pada tahun 2045 berada di Kabupaten Mimika sebanyak 405.823 jiwa hal ini di perkirakan karena jumlah penduduk dan Luas wilayah Kabupaten Mimika merupakan wilayah terbesar dengan Rata2 Pertumbuhan Penduduk Tahunannya rata2 2-3%, Sedangkan jumlah terendah berada di Kabupaten Puncak sebanyak 128.726 jiwa dikarenakan luas wilayah Kab puncak yang tergolong kecil dan berada pada daerah pegunungan. Proyeksi penduduk total pada tahun 2025 hingga 2045 di Provinsi Papua Tengah mengalami peningkatan.

2.6.2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana komposisi penduduk akan berkembang seiring waktu. Dengan mengeksplorasi tren pertumbuhan, pada bagian ini akan menguraikan proyeksi yang didasarkan pada distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Tabel berikut adalah hasil proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 61 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)	(13)	(15)	(16)	(18)	(19)
1	Nabire	91.105	72.628	92.508	72.628	96.070	75.424	99.768	78.328	103.609	81.343	107.598	84.475
2	Paniai	124.031	102.607	126.598	104.731	133.150	110.151	140.041	115.852	147.288	121.847	154.911	128.153
3	Puncak Jaya	126.348	106.462	128.963	108.666	135.638	114.290	142.657	120.205	150.040	126.426	157.805	132.969
4	Mimika	175.846	145.811	179.487	148.829	188.777	156.532	198.547	164.634	208.823	173.155	219.632	182.117
5	Dogiyai	65.393	57.248	66.747	58.434	70.202	61.458	73.835	64.640	77.657	67.985	81.677	71.504
6	Intan Jaya	75.992	65.756	77.565	65.756	81.579	69.159	85.801	72.738	90.241	76.502	94.911	80.461
7	Deiyai	55.761	47.917	56.916	48.909	59.861	51.440	62.959	54.103	66.218	56.903	69.645	59.847
8	Puncak	63.463	54.618	64.030	55.107	65.460	56.338	66.923	57.596	68.418	58.883	69.946	60.198
Total		777.939	653.048	792.814	663.060	830.737	694.793	870.532	728.095	912.295	763.044	956.125	799.725

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 diperkirakan jumlah penduduk baik yang berjenis kelamin ataupun perempuan mengalami peningkatan. Proporsi jumlah penduduk laki-laki pada tahun eksisting dan tahun proyeksi memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan.

2.6.1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia

Analisis proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia bertujuan untuk menggambarkan bagaimana struktur usia penduduk akan berkembang dalam jangka waktu tertentu. Dengan menyelidiki perubahan-perubahan dalam distribusi usia dan dinamika pertumbuhan penduduk, bagian ini akan menguraikan proyeksi yang memberikan pemahaman tentang perkembangan demografis di masa depan. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan sosial, kesehatan, dan ekonomi, serta memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam menghadapi tantangan demografis. Tabel berikut merupakan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Provinsi Papua Tengah 2025-2045.

Tabel 2. 62 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)			Tahun Proyeksi														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	0-4	80.383	55.382	135.765	81.912	56.198	138.110	85.809	58.889	144.698	89.898	61.712	151.610	94.188	64.673	158.860	98.688	67.779	166.467
2	5-9	76.575	55.059	131.634	78.035	56.025	134.061	81.759	58.776	140.535	85.665	61.665	147.331	89.765	64.701	154.465	94.066	67.889	161.955
3	10-14	62.879	50.573	113.452	64.077	51.323	115.401	67.133	53.753	120.886	70.339	56.303	126.641	73.703	58.977	132.680	77.233	61.783	139.015
4	15-19	57.062	52.881	109.943	58.152	53.681	111.833	60.932	56.244	117.176	63.849	58.934	122.783	66.910	61.757	128.667	70.123	64.719	134.842
5	20-24	66.362	60.502	126.864	67.631	61.417	129.049	70.866	64.344	135.210	74.260	67.415	141.675	77.822	70.637	148.459	81.561	74.019	155.580
6	25-29	71.000	65.645	136.645	72.363	66.673	139.036	75.837	69.862	145.700	79.484	73.210	152.694	83.312	76.723	160.035	87.330	80.410	167.740
7	30-34	70.678	66.224	136.903	72.036	67.249	139.284	75.497	70.481	145.978	79.129	73.874	153.003	82.942	77.435	160.377	86.944	81.174	168.117
8	30-39	66.396	64.606	131.002	67.668	65.593	133.261	70.911	68.723	139.634	74.316	72.007	146.323	77.888	75.455	153.343	81.638	79.072	160.710
9	40-44	58.333	54.885	113.218	59.452	55.723	115.174	62.305	58.365	120.669	65.299	61.137	126.436	68.442	64.046	132.488	71.741	67.098	138.839
10	45-49	50.849	45.184	96.033	51.824	45.856	97.680	54.309	48.027	102.336	56.918	50.305	107.223	59.656	52.695	112.350	62.529	55.202	117.732
11	50-54	38.731	32.309	71.039	39.473	32.801	72.274	41.367	34.377	75.744	43.355	36.031	79.386	45.442	37.767	83.209	47.632	39.589	87.221
12	55-59	30.056	21.591	51.647	30.630	21.912	52.542	32.092	22.967	55.059	33.626	24.074	57.700	35.237	25.236	60.473	36.927	26.455	63.382
13	60-64	20.227	12.695	32.922	20.613	12.878	33.491	21.597	13.494	35.091	22.630	14.141	36.771	23.714	14.820	38.534	24.851	15.532	40.384
14	65-69	13.581	7.399	20.979	13.838	7.502	21.340	14.495	7.862	22.357	15.185	8.239	23.424	15.908	8.635	24.543	16.667	9.051	25.718
15	70-74	8.015	4.851	12.866	8.167	4.919	13.085	8.555	5.157	13.712	8.961	5.407	14.368	9.388	5.670	15.058	9.836	5.945	15.781
16	>75	6.815	3.261	10.076	6.944	3.310	10.254	7.273	3.472	10.745	7.618	3.642	11.259	7.979	3.820	11.800	8.359	4.008	12.366
Total		777.939	653.048	1.430.987	792.814	663.060	1.455.875	830.737	694.793	1.525.529	870.532	728.095	1.598.627	912.295	763.044	1.675.340	956.125	799.725	1.755.850

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok usia, diketahui jumlah penduduk berdasarkan usia mengalami peningkatan di setiap kelompok usianya. Jumlah penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia bukan angkatan kerja (usia 0-14 dan 65+ tahun).

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana terdiri dari proyeksi kebutuhan rumah, air minum, listrik, pengelolaan persampahan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan telekomunikasi.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah

Proyeksi kebutuhan rumah mendalami perkembangan perumahan dalam konteks kebutuhan masyarakat. Analisis ini difokuskan pada estimasi pertumbuhan populasi dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan akan perumahan. Dengan pemahaman tentang kebutuhan perumahan yang proyektif, informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan kota, kebijakan perumahan, dan strategi pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Tabel 2.62 berikut menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan rumah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
		Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Tempat Tinggal (Unit)	2025		2030		2035		2040		2045	
				Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Tempat Tinggal (Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nabire	174.375	34.875	177.040	35.408	183.856	36.771	190.935	38.187	198.286	39.657	348.490	69.698
2	Paniai	229.606	45.921	234.311	46.862	246.437	49.287	259.190	51.838	272.604	54.521	136.323	27.265
3	Puncak Jaya	233.895	46.779	238.687	47.737	251.040	50.208	264.032	52.806	277.697	55.539	244.516	48.903
4	Mimika	324.987	64.997	331.646	66.329	348.811	69.762	366.864	73.373	385.852	77.170	60.326	12.065
5	Dogiyai	121.055	24.211	123.536	24.707	129.931	25.986	136.656	27.331	143.729	28.746	132.643	26.529
6	Intan Jaya	140.677	28.135	143.559	28.712	150.988	30.198	158.802	31.760	167.020	33.404	456.436	91.287
7	Deiyai	103.226	20.645	105.341	21.068	110.792	22.158	116.526	23.305	122.557	24.511	83.162	16.632
8	Puncak	116.799	23.360	117.838	23.568	120.470	24.094	123.161	24.632	125.913	25.183	308.277	61.655
Total		1.444.620	288.924	1.471.958	294.392	1.542.325	308.465	1.616.167	323.233	1.693.657	338.731	1.770.174	354.035

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan rumah pada tabel di atas, jumlah kebutuhan rumah atau tempat tinggal setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat. Total kebutuhan sarana rumah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2045 mencapai 354.035 unit. Kabupaten Intan Jaya menjadi kabupaten yang memiliki kebutuhan tempat tinggal atau rumah yang paling tinggi di antara kabupaten lainnya yaitu sebanyak 91.287 unit. Hal tersebut terjadi karena perkiraan jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya memiliki jumlah yang paling besar.

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum memegang peranan krusial dalam merencanakan sistem penyediaan air yang efisien dan berkelanjutan. Air minum bukan hanya merupakan kebutuhan esensial bagi setiap individu, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Rata-rata konsumsi air per kapita berkisar antara 90-150 liter setiap hari. Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan perkembangan kebutuhan air minum di masa depan. Dengan memahami proyeksi kebutuhan air minum, dapat dirancang strategi penyediaan air yang efektif dan adaptif untuk memenuhi tuntutan masyarakat serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 64 Proyeksi Air Minum di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Minum (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nabire	174.375	78.678,19	177.040	79.880,56	183.856	82.955,93	190.935	86.149,70	198.286	89.466,43	205.919	92.910,85
2	Paniai	229.606	103.598,30	234.311	105.720,90	246.437	111.192,18	259.190	116.946,60	272.604	122.998,82	286.712	129.364,26
3	Puncak Jaya	233.895	105.533,50	238.687	107.695,80	251.040	113.269,40	264.032	119.131,46	277.697	125.296,90	292.069	131.781,42
4	Mimika	324.987	146.633,96	331.646	149.638,61	348.811	157.383,50	366.864	165.529,24	385.852	174.096,58	405.823	183.107,35
5	Dogiyai	121.055	54.620,18	123.536	55.739,48	129.931	58.624,64	136.656	61.659,14	143.729	64.850,71	151.169	68.207,49
6	Intan Jaya	140.677	63.473,49	143.559	64.773,91	150.988	68.125,89	158.802	71.651,33	167.020	75.359,21	175.663	79.258,97
7	Deiyai	103.226	46.575,35	105.341	47.529,66	110.792	49.989,49	116.526	52.576,64	122.557	55.297,68	128.900	58.159,54
8	Puncak	116.799	52.699,50	117.838	53.168,33	120.470	54.356,12	123.161	55.570,45	125.913	56.811,90	128.726	58.081,09
Total		1.444.619,85	651.812,48	1.471.957,55	664.147,25	1.542.325,25	695.897,15	1.616.167,02	729.214,56	1.693.657,45	764.178,24	1.774.979,98	800.870,97

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045, diperkirakan bahwa kebutuhan akan air minum pada Tahun 2045 adalah sebesar 800.870,97 liter/detik. Kabupaten Mimika memiliki hasil proyeksi kebutuhan air minum yang paling besar pada Tahun 2045 yaitu 183.107,35 liter/detik. Dengan jumlah kebutuhan tersebut perlu diperhatikan ketersediaan sumber air baku yang ada di wilayah tersebut.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Energi listrik merupakan elemen vital dalam pembangunan dan keberlanjutan masyarakat seiring dengan pertumbuhan teknologi dan aktivitas sehari-hari yang semakin bergantung pada sumber daya ini. Dengan pemahaman mendalam terhadap proyeksi ini, dapat dirancang kebijakan energi yang efisien dan berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk mendukung infrastruktur listrik yang memadai dan ramah lingkungan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis kebutuhan energi listrik yang didasarkan pada populasi penduduk.

Tabel 2. 65 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Listrik (watt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(20)
1	Nabire	174.375	87.187.708	177.040	88.520.125	183.856	91.928.114	190.935	95.467.309	198.286	99.142.761	205.919	102.959.717
2	Paniai	229.606	114.803.086	234.311	117.155.257	246.437	123.218.281	259.190	129.595.078	272.604	136.301.887	286.712	143.355.788
3	Puncak Jaya	233.895	116.947.582	238.687	119.343.747	251.040	125.520.173	264.032	132.016.249	277.697	138.848.517	292.069	146.034.378
4	Mimika	324.987	162.493.309	331.646	165.822.927	348.811	174.405.471	366.864	183.432.224	385.852	192.926.176	405.823	202.911.510
5	Dogiyai	121.055	60.527.681	123.536	61.768.042	129.931	64.965.250	136.656	68.327.951	143.729	71.864.710	151.169	75.584.537
6	Intan Jaya	140.677	70.338.532	143.559	71.779.595	150.988	75.494.114	158.802	79.400.855	167.020	83.509.765	175.663	87.831.308
7	Deiyai	103.226	51.612.758	105.341	52.670.274	110.792	55.396.159	116.526	58.263.120	122.557	61.278.456	128.900	64.449.848
8	Puncak	116.799	58.399.269	117.838	58.918.808	120.470	60.235.064	123.161	61.580.725	125.913	62.956.449	128.726	64.362.907
Total		1.444.620	722.309.925	1.471.958	735.978.776	1.542.325	771.162.626	1.616.167	808.083.509	1.693.657	846.828.723	1.774.980	887.489.992

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan listrik di Papua Tengah Tahun 2025-2045 mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Adapun kebutuhan listrik pada Tahun 2045 diperkirakan mencapai 887.489.992 Watt. Kabupaten yang memiliki kebutuhan energi listrik terbesar di Tahun 2045 berada pada Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 146.034.370 Watt. Sedangkan yang memiliki kebutuhan listrik terendah yaitu Kabupaten Puncak sebanyak 64.363.907 Watt.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan menjadi aspek yang semakin diperhitungkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi, timbulan sampah terus mengalami peningkatan. Pengelolaan persampahan tidak hanya menyangkut upaya pemrosesan dan pemilihan limbah, tetapi juga menggambarkan komitmen terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman yang matang terhadap proyeksi ini, dapat dirancang kebijakan pengelolaan persampahan yang berkesinambungan, menjadi dasar untuk menghadapi tantangan meningkatnya sampah dalam masyarakat modern. Dalam analisis ini terdiri dari perhitungan timbulan sampah dan prasarana pengelolaan sampah.

A. Prasarana Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya timbulan sampah berdampak pada keberlanjutan infrastruktur pengelolaan sampah. Dalam konteks ini, analisis kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi hal penting untuk memastikan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan, dan memenuhi standar kebersihan yang tinggi. Tabel berikut merupakan hasil proyeksi kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah atau TPST Regional yang terdiri dari TPS I, TPS III, dan TPS 3R di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 66 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi Tahun 2023					Tahun Proyeksi																								
		Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Kg/org/hari)	Jumlah Fasilitas Pengelolaa n Sampah			Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Ton)	Jumlah Kebutuhan TPST Regional			Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Ton)	Jumlah Kebutuhan TPST Regional			Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Ton)	Jumlah Kebutuhan TPST Regional			Penduduk (Jiwa)	Produksi Sampah (Ton)	Jumlah Kebutuha n TPST Regional							
				T P S I	T P S I I	T P S 3 R			T P S I	T P S I I	T P S 3 R			T P S I	T P S I I	T P S 3 R			T P S I	T P S I I	T P S 3 R			T P S I	T P S I I	T P S 3 R	T P S I	T P S I I	T P S 3 R		
1	Nabire	174.375	43.594	70	1	436	177.040	44.260	71	1	59	183.856	45.964	74	2	460	190.935	47.734	76	2	477	198.286	49.571	79	2	682	205.919	51.480	82	2	515
2	Paniai	229.606	57.402	92	2	574	234.311	58.578	94	2	78	246.437	61.609	99	2	616	259.190	64.798	104	2	648	272.604	68.151	109	2	699	286.712	71.678	115	2	717
3	Puncak Jaya	233.895	58.474	94	2	585	238.687	59.672	95	2	80	251.040	62.760	100	2	628	264.032	66.008	106	2	660	277.697	69.424	111	2	665	292.069	73.017	117	2	730
4	Mimika	324.987	81.247	130	3	812	331.646	82.911	133	3	11	348.811	87.203	140	3	872	366.864	91.716	147	3	917	385.852	96.463	154	3	959	405.823	101.456	162	3	1015
5	Dogiyai	121.055	30.264	48	1	303	123.536	30.884	49	1	41	129.931	32.483	52	1	325	136.656	34.164	55	1	342	143.729	35.932	57	1	418	151.169	37.792	60	1	378
6	Intan Jaya	140.677	35.169	56	1	352	143.559	35.890	57	1	48	150.988	37.747	60	1	377	158.802	39.700	64	1	397	167.020	41.755	67	1	406	175.663	43.916	70	1	439
7	Deiyai	103.226	25.806	41	1	258	105.341	26.335	42	1	35	110.792	27.698	44	1	277	116.526	29.132	47	1	291	122.557	30.639	49	1	315	128.900	32.225	52	1	322
8	Puncak	116.799	29.200	47	1	292	117.838	29.459	47	1	39	120.470	30.118	48	1	301	123.161	30.790	49	1	308	125.913	31.478	50	1	343	128.726	32.181	51	1	322
Total		1.444.620	361.155	578	12	3612	1.471.958	367.989	589	12	419	1.542.325	385.581	617	13	3856	1.616.167	404.042	646	14	4044	1.693.657	423.414	677	14	433	1.774.980	443.745	700	15	443

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan TPST Regional di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 meliputi; kebutuhan TPS I sebanyak 710 unit, TPS III 15 unit, dan TPS 3R 4.437 unit. Jika dilihat berdasarkan jenis TPS, diperkirakan TPS 3R memiliki angka kebutuhan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan TPS I dan TPS III.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, menjadi hal yang utama dalam merespons dinamika kesehatan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan pola penyakit, dan perkembangan teknologi medis, permintaan terhadap fasilitas kesehatan terus berkembang. Analisis proyeksi ini akan memberikan landasan untuk perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan yang tepat, memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat. Berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 2. 67 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Tahun 2023		Tahun Proyeksi									
				2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kebutuhan Rumah Sakit
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nabire	174.375	1	177.040	1	183.856	1	190.935	1	198.286	1	205.919	1
2	Paniai	229.606	1	234.311	1	246.437	1	259.190	1	272.604	1	286.712	1
3	Puncak Jaya	233.895	1	238.687	1	251.040	1	264.032	1	277.697	1	292.069	1
4	Mimika	324.987	1	331.646	1	348.811	1	366.864	2	385.852	2	405.823	2
5	Dogiyai	121.055	1	123.536	1	129.931	1	136.656	1	143.729	1	151.169	1
6	Intan Jaya	140.677	1	143.559	1	150.988	1	158.802	1	167.020	1	175.663	1
7	Deiyai	103.226	0	105.341	0	110.792	0	116.526	0	122.557	1	128.900	1
8	Puncak	116.799	0	117.838	0	120.470	1	123.161	1	125.913	1	128.726	1
Total		1.444.620	6	1.471.958	6	1.542.325	6	1.616.167	7	1.693.657	7	1.774.980	7

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/SMP, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA, dan Perguruan Tinggi (PT). Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, perlu dilakukan proyeksi kebutuhan sarana pendidikan. Untuk mengetahui besaran kebutuhan sarana pendidikan 20 tahun kedepan dapat dilihat dari proyeksi jumlah penduduk dan disandingkan dengan standar minimal kebutuhan pendidikan yang termuat dalam standar SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu:

- Sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 1.250 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 500 m²/unit.
- Sarana pendidikan Sekolah Dasar dengan standar jumlah penduduk pendukung sebesar 1.600 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 2.000 m²/unit.
- Sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 9.000 m²/unit.
- Sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta sederajat dengan jumlah penduduk pendukung sebesar 4.800 jiwa/unit dengan luas lahan 12.500 m²/unit.

Tabel berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan sarana fasilitas pendidikan tingkat TK, SD, dan SMP di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045. Berdasarkan hasil analisis, perkiraan kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 terdiri dari 1.420 unit TK, 1.109 unit SD, dan 370 unit SMP. Hasil proyeksi tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil jumlah kebutuhan unit sarana pendidikan. Meskipun begitu, jumlah kebutuhan dari tahun 2025 hingga 2045 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya, hasil proyeksi kebutuhan sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 68 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SMP) di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi 2023						Tahun Proyeksi																													
								2025						2030						2035						2040						2045					
		Penduduk (Jiwa)	T K	S D	S M P	S M A	Pe rg ur ua n Ti ng gi	Penduduk (Jiwa)	T K	S D	S M P	S M A	Per gur ua n Tin ggi	Penduduk (Jiwa)	TK	S D	S M P	S M A	Per gur ua n Tin ggi	Penduduk (Jiwa)	T K	S D	S M P	S M A	Per gur ua n Tin ggi	Penduduk (Jiwa)	T K	S D	S M P	S M A	Per gur ua n Tin ggi						
1	Nabire	174.375	1 4 0	1 0 9	3 6	3 6	2	177.040	1 4 2	1 1 1	3 7	3 7	3	183.856	147	1 1 5	3 8	3 8	3	190.935	1 5 3	1 1 9	4 0	4 0	3	198.286	1 5 9	1 2 4	4 1	4 1	3	205.919	1 6 5	1 2 9	4 3	4 3	3
2	Paniai	229.606	1 8 4	1 4 4	4 8	4 8	3	234.311	1 8 7	1 4 6	4 9	4 9	3	246.437	197	1 5 4	5 1	5 1	4	259.190	2 0 7	1 6 2	5 4	5 4	4	272.604	2 1 8	1 7 0	5 7	5 7	4	286.712	2 2 9	1 7 9	6 0	6 0	4
3	Puncak Jaya	233.895	1 8 7	1 4 6	4 9	4 9	3	238.687	1 9 1	1 4 9	5 0	5 0	3	251.040	201	1 5 7	5 2	5 2	4	264.032	2 1 1	1 6 5	5 5	5 5	4	277.697	2 2 2	1 7 4	5 8	5 8	4	292.069	2 3 4	1 8 3	6 1	6 1	4
4	Mimika	324.987	2 6 0	2 0 3	6 8	6 8	5	331.646	2 6 5	2 0 7	6 9	6 9	5	348.811	279	2 1 8	7 3	7 3	5	366.864	2 9 3	2 2 9	7 6	7 6	5	385.852	3 0 9	2 4 1	8 0	8 0	6	405.823	3 2 5	2 5 4	8 5	8 5	6
5	Dogiyai	121.055	9 7	7 6	2 5	2 5	2	123.536	9 9	7 7	2 6	2 6	2	129.931	104	8 1	2 7	2 7	2	136.656	1 0 9	8 5	2 8	2 8	2	143.729	1 1 5	9 0	3 0	3 0	2	151.169	1 2 1	9 4	3 1	3 1	2
6	Intan Jaya	140.677	1 1 3	8 8	2 9	2 9	2	143.559	1 1 5	9 0	3 0	3 0	2	150.988	121	9 4	3 1	3 1	2	158.802	1 2 7	9 9	3 3	3 3	2	167.020	1 3 4	1 0 4	3 5	3 5	2	175.663	1 4 1	1 1 0	3 7	3 7	3
7	Deiyai	103.226	8 3	6 5	2 2	2 2	1	105.341	8 4	6 6	2 2	2 2	2	110.792	89	6 9	2 3	2 3	2	116.526	9 3	7 3	2 4	2 4	2	122.557	9 8	7 7	2 6	2 6	2	128.900	1 0 3	8 1	2 7	2 7	2
8	Puncak	116.799	9 3	7 3	2 4	2 4	2	117.838	9 4	7 4	2 5	2 5	2	120.470	96	7 5	2 5	2 5	2	123.161	9 9	7 7	2 6	2 6	2	125.913	1 0 1	7 9	2 6	2 6	2	128.726	1 0 3	8 0	2 7	2 7	2
Total		1.444.620	1 1 5 6	9 0 3	3 0 1	3 0 1	21	1.471.958	1 1 7 8	9 2 0	3 0 7	3 0 7	21	1.542.325	1.234	9 6 4	3 2 1	3 2 1	22	1.616.166	1 2 9 3	1 0 1 0	3 3 7	3 3 7	23	1.593.658	1 3 5 5	1 0 5 9	3 5 3	3 5 3	24	1.774.980	1 4 2 0	1 1 0 9	3 7 0	3 7 0	25

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

2.6.2.7 Proyeksi Kebutuhan Sarana Telekomunikasi

Pengembangan teknologi telekomunikasi merupakan upaya untuk menyediakan jaringan bagi pengguna untuk berkomunikasi. Salah satu faktor yang menunjang pengembangan teknologi telekomunikasi tersebut adalah dengan melakukan pembangunan menara telekomunikasi. Dalam dokumen ini, analisis kebutuhan telekomunikasi terdiri dari perhitungan proyeksi kebutuhan menara dan BTS di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 69 Proyeksi Kebutuhan Sarana Telekomunikasi di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045

N o.	Kabupaten /Kota	Kondisi 2023				Tahun Proyeksi																			
						2025				2030				2035				2040				2045			
		Penduduk (Jiwa)	Pengguna an Seluler	B T S (5)	Menara	Penduduk (Jiwa)	Pengguna an Seluler	B T S (9)	Menara	Penduduk (Jiwa)	Pengguna an Seluler	B T S (1 3)	Menara	Penduduk (Jiwa)	Pengguna an Seluler	B T S (1 7)	Menara	Penduduk (Jiwa)	Pengguna an Seluler	B T S (2 1)	Menara	Penduduk (Jiwa)	Pengguna an Seluler	B T S (2 5)	Menara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Nabire	174.375	123.545	8 2	27	177.040	125.433	8 3	28	183.856	130.262	8 6	29	190.935	135.277	8 9	30	198.286	140.485	9 3	31	205.919	145.894	9 6	32
2	Paniai	229.606	162.676	1 0 8	36	234.311	166.009	1 1 0	37	246.437	174.600	1 1 5	38	259.190	183.636	1 2 1	40	272.604	193.140	1 2 8	43	286.712	203.135	1 3 4	45
3	Puncak Jaya	233.895	165.715	1 1 0	37	238.687	169.110	1 1 2	37	251.040	177.862	1 1 8	39	264.032	187.067	1 2 4	41	277.697	196.748	1 3 0	43	292.069	206.931	1 3 7	46
4	Mimika	324.987	230.253	1 5 2	51	331.646	234.971	1 5 5	52	348.811	247.133	1 6 3	54	366.864	259.923	1 7 2	57	385.852	273.376	1 8 1	60	405.823	287.526	1 9 0	63
5	Dogiyai	121.055	85.768	5 7	19	123.536	87.525	5 8	19	129.931	92.056	6 1	20	136.656	96.821	6 4	21	143.729	101.832	6 7	22	151.169	107.103	7 1	24
6	Intan Jaya	140.677	99.670	6 6	22	143.559	101.712	6 7	22	150.988	106.975	7 1	24	158.802	112.511	7 4	25	167.020	118.333	7 8	26	175.663	124.457	8 2	27
7	Deiyai	103.226	73.135	4 8	16	105.341	74.634	4 9	16	110.792	78.496	5 2	17	116.526	82.559	5 5	18	122.557	86.832	5 7	19	128.900	91.325	6 0	20
8	Puncak	116.799	82.752	5 5	18	117.838	83.488	5 5	18	120.470	85.353	5 6	19	123.161	87.260	5 8	19	125.913	89.209	5 9	20	128.726	91.202	6 0	20
	Total	1.444.620	1.023.513	6 7 7	226	1.471.958	1.042.882	6 9 0	230	1.542.325	1.092.737	7 2 3	241	1.616.167	1.145.054	7 5 7	252	1.693.657	1.199.956	7 9 4	265	1.774.980	1.257.573	8 3 2	277

Sumber: RPD Provinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebutuhan menara di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2045 diperkirakan sebanyak 277 unit. Sedangkan kebutuhan akan BTS adalah sebanyak 832. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana telekomunikasi yang terdiri dari BTS dan menara mengalami peningkatan dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan wilayah

2.7.1 RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043

Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomii Baru (DOB) merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Induk Papua. Arah Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua Tengah ini salah satunya masih mengacu pada tujuan pembangunan dalam RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043. Tujuan RTRW Provinsi Papua Tengah yaitu *“Mewujudkan Provinsi Papua Tengah yang Mandiri dan Maju melalui Optimalisasi Industri yang berkelanjutan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Makmur di Tahun 2045”*.

Rumusan konsep tujuan RTRW Provinsi Papua Tengah tahun 2023-2043 sbegai berikut:

1. Mendukung tujuan penataan Ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan Rencana Rincinya) melalui keterpaduan antar Sektor, Wilayah dan Masayrakat;
2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi;
3. Mengakomodasi fungsi dan peran Provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional;
4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah Provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi);
5. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (Dua Puluh) tahun; dan
6. Tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan

penataan ruang. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043 sebagai berikut :

- a. pengembangan system pusat kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- b. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-desa;
- c. pembangunan Kawasan budidaya berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan lingkungan dan mitigasi bencana;
- d. pembangunan kawasan berbasis kearifan local dan kampung adat;
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan system jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
- f. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- g. penguatan kelembagaan pembangunan wilayah.

Pengaturan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsinya menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis dan tumpang tindih pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Papua Tengah. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Aspek rencana struktur dan rencana pola ruang merupakan pokok dari penataan ruang di Provinsi Papua Tengah. Berikut rencana struktur ruang wilayah di Provinsi Papua Tengah.

2.7.2 Rencana Struktur Ruang

2.7.4.1 Rencana Sistem Perkotaan

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan di Provinsi Papua Tengah, maka sistem perkotaan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju Kawasan internasional, pusat industry dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi, serta sebagai Pelabuhan hub intrernasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan melalui:

- a. Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama diwilayah Indonesia bagian tyimur, bagian barat, dan Negara Asia Pasifik melalui peningkatan sarana dan prasarana;
- b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan Pembangunan prasarana kota terpadu;
- c. Peningkatan peran badan usaha dalam Pembangunan prasarana perkotaan;
- d. Pengembangan kegiatan ekonomi (industry, jasa, perdagangan, perbankan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
- e. Pengembangan kerja sama Pembangunan dengan kota-kota lain (sister City); dan
- f. Peningkatan kualitas SDM dan peran serta Masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi Utama PKN, terutama jasa, Industri, dan Perdagangan.

Pusat kegiatan Nasional merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Internasional, nasional atau beberapa provinsi. Pusat kegiatan Nasional yang ditetapkan diwilayah Provinsi Papua Tengah berada di kabupaten Nabire dan kabupaten Mamika. Kabupaten Nabire berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk kegiatan produksi pertanian, Perkebunan, perikanan, pemerintahan, industry dan perdagangan serta jasa yang berskala Internasional. Sedangkan Kabupaten Mimika berfungsi sebagai pusat koleksi dan Distribusi skala regional untuk kegiatan produksi pertanian, perikanan, industry, perdagangan jasa dan pertambangan. Selain itu, kedua Kabupaten juga memeiliki fungsi primer menjadi simpul transportasi darat, udara maupun laut skala pelayanan nasional dan menjadi pintu Gerbang Provinsi Papua Tengah dari arah Selatan. Secara rinci fungsi PKN mimika sebagai berikut :

- a. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan
- b. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan berbasis bisnis
- c. Pusat pengembangan pertambangan tembaga dan emas

- d. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan
- e. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata berbasis potensi kearifan lokal
- f. Pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional
- g. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa
- h. Pengembangan berbasis mitigasi bencana banjir
- i. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- j. Pengendalian perkembangan fisik PKW untuk mempertahankan keberadaan kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Secara rinci fungsi PKN Kabupaten Nabire sebagai berikut :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat pendidikan skala regional dan skala lokal
- c. Pusat kesehatan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- d. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata berbasis potensi kearifan lokal
- e. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan
- f. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung aksesibilitas, kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa.
- g. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perkotaan skala nasional

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagai simpul kedua ekspor-impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, melalui:

- a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam provinsi;
- b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;

- c. Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
- d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
- e. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan di wilayah Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai. Penentuan Kabupaten Paniai sebagai PKW karena kawasan perkotaan ini berfungsi sebagai simpul kegiatan yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi angkutan umum penumpang dan barang serta transportasi laut yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Secara rinci, berikut merupakan fungsi PKW Kabupaten Paniai :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pusat rekreasi, olahraga dan pariwisata berbasis kearifan lokal skala lokal
- d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
- e. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- f. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
- g. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

Secara rinci, berikut merupakan Fungsi PWK Kabupaten Dogiyai :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- d. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung

kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa

e. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

Secara rinci, berikut merupakan fungsi PKW kabupaten Deiyai :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
- e. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
- f. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagai pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik, melalui:

- a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
- b. Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;
- c. Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasarana perkotaan;
- d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
- e. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Pusat kegiatan lokal (PKL) di Provinsi Papua Tengah ditetapkan Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya. Secara rinci, berikut merupakan fungsi PKL :

- a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
- b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
- c. Pusat rekreasi, olahraga dan pariwisata berbasis kearifan lokal skala lokal
- d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil

- e. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
- f. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
- g. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional

Penetapan masing-masing pusat kegiatan diarahkan untuk memiliki interkoneksi yang sinergis dengan dukungan prasarana wilayah terutama jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, jaringan dan stasiun kereta api, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan air limbah, persampahan, dan lainnya. Selain itu, juga terkoneksi dengan persebaran fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, perdagangan dan jasa dan sebagainya yang mendukung kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas kehidupan yang merata.

2.7.4.2 Rencana Jaringan Prasarana Utama

Pengembangan sistem prasarana utama dilakukan secara hierarkis sesuai dengan interaksi dan kebutuhan penanganan permasalahan pada tiap wilayah serta potensi yang perlu dipacu perkembangannya. Sistem prasarana utama juga perlu diupayakan untuk mendorong pengembangan aktivitas perekonomian serta keterkaitan antar wilayah terutama antara pusat kegiatan dan aktivitas perekonomian yang akan dikembangkan pada masing masing sub satuan wilayah pengembangan maupun pusat pertumbuhannya. Sistem prasarana utama diperlukan juga untuk meningkatkan hubungan atau interaksi antara kawasan perkampungan dan kawasan perkotaan serta wilayah potensial di antara keduanya sehingga diharapkan dapat mendorong interaksi kegiatan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya atau bahkan antar satuan wilayah pengembangan.

Sistem prasarana utama yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang direncanakan dengan 2 langkah, yang pertama adalah peningkatan prasarana untuk melayani kebutuhan saat ini dan yang kedua adalah pengembangan sistem prasarana utama untuk mendukung keseimbangan pembangunan pada tiap wilayah di Provinsi Papua Tengah serta untuk meningkatkan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pendukungnya. Sistem jaringan prasarana utama mencakup:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut;
- c. sistem jaringan transportasi udara; dan
- d. sistem transportasi antarmoda.

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

1. Rencana Jaringan Jalan Raya

Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Rencana jaringan jalan di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.

Jalan Nasional :

- Jayapura - Sarmi - Mamberamo Raya - Nabire ;
- Wamena - Karubaga - Mulia (Puncak Jaya) ;
- Timika - Waghete (Deiyai) - Enarotali (Paniai).

Jalan Provinsi :

- Nabire - Waghete (Deiyai) - Enarotali (Paniai) - Sugapa (Intan Jaya);
- Sugapa (Intan Jaya) - Jila (Puncak) - Ilaga (Puncak) ;
- Botawa (Waropen) - Sugapa (Intan Jaya).

2. Rencana Terminal

Terminal transportasi merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum serta sebagai prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.

Rencana Terminal Penumpang :

- Terminal Penumpang Tipe A berada di : 1) Kabupaten Nabire dan ; 2) Kabupaten Mimika ;
- Terminal Penumpang Tipe B berada di ; 1) terminal oyehe kabupaten nabire ; 2) terminal mulia kabupaten puncak jaya ; 3) terminal enarotali kabupaten paniai dan : 4) terminal waghete kabupaten deiyai.

3. Rencana Jaringan Sungai (Danau)

Jaringan pelayanan transportasi sungai antar kabupaten di Provinsi Papua Tengah saat ini melayani lintas kabupaten di Sungai (Danau) Intan Jaya. Untuk wilayah daratan yang memiliki potensi sungai, moda transportasi ini menjadi alternatif untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman yang tidak terlayani moda transportasi lain. Pengembangan transportasi sungai diarahkan pada sungai yang layak dilayari. Dermaga sungai hanya ada 2 di provinsi papua tengah dan keduanya ada di kabupaten mimika, yaitu : 1) dermaga sungai mimika di kabupaten mimika ; dan 2) dermaga sungai kapiroya di kabupaten mimika. Dermaga danau ada 3, yaitu : 1) dermaga danau paniai ; dan 2) danau tagi di kabupaten paniai ; 3) dermaga danau tigi/waghete di kabupaten deiyai. Penyeberangan lintas provinsi ada 2 di provinsi papua tengah, yaitu : 1) Pelabuhan Penyeberangan Pomako di Kabupaten Mimika dan ; 2) Pelabuhan Penyeberangan Samabusa di Kabupaten Nabire.

B. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berupa pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berupa alur pelayaran. Pelabuhan laut dibedakan berdasarkan atas peran, fungsi, klasifikasi dan jenisnya.

1. Rencana Pelabuhan Utama

Rencana pengembangan pelabuhan dengan fungsi pelabuhan utama di Provinsi Papua Tengah yaitu Pelabuhan Samabusa Nabire di Kabupaten Nabire.

2. Rencana Pelabuhan Pengumpul

Rencana pengembangan pelabuhan dengan fungsi pelabuhan Pengumpul di Provinsi Papua Tengah yaitu Pelabuhan Samabusaa Nabire di Kabupaten Nabire dan Pelabuhan Pomako di Kabupaten Mimika.

3. Rencana Pelabuhan Pengumpan

Rencana Pelabuhan Pengumpan di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten adalah sebagai berikut :

Kabupaten Nabire :

- Terdiri dari Pelabuhan Moor, Pelabuhan P. Mambor, dan Pelabuhan Napan.

-

Kabupaten Mimika :

- Terdiri dari Pelabuhan Hiripau, Pelabuhan Agimuga, Pelabuhan Kokonao, dan Pelabuhan Keakwa.

4. Pelabuhan Khusus :

Rencana Pelabuhan Khusus di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Kabupaten, yaitu Pelabuhan Amamapare yang berada di Kabupaten Mimika.

C. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sedangkan tatanan kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

1. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder

Rencana Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- Bandar Udara Wanggar (Dauw Aturure) di Kabupaten Nabire ;
- Bandar Udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika.

2. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier

Rencana Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- i. Bandar Udara Waghete di Kabupaten Deiyai ;
- ii. Bandar Udara Iratoy di Kabupaten Puncak Jaya.

3. Bandar Udara Pengumpan

Bandar Pengumpan yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- a) Bandar Udara Mulia, Bandar Udara Ilu, Bandar Udara Fawi, Bandar Udara Derpos, Bandar Udara Torere, dan Bandar Udara Iratoy di Kabupaten Puncak Jaya ;
- b) Bandar Udara Sinak, Bandar Udara Ilaga, Bandar Udara Beoga, dan Bandar Udara Agandugume di Kabupaten Puncak ;
- c) Bandar Udara Waghete di Kabupaten Deiyai ;
- d) Bandar Udara Sugapa di Kabupaten Intan Jaya ;
- e) Bandar Udara Enarotali, dan Bandar Udara Obano di Paniai ;
- f) Bandar Udara Moanamani di Kabupaten Dogiyai ;
- g) Bandar Udara Tsinga, dan Bandar Udara Arwanop di Kabupaten Mimika.

4. Bandar Udara Khusus

Bandar Udara Khusus di Provinsi Papua Tengah, yaitu Bandar Udara Moses Kilangin, selain sebagai Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder, namun bandar udara tersebut juga sebagai bandar udara milik PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

D. Sistem Transportasi Antarmoda

Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan moda lebih dari satu dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi intramoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan satu moda dalam beberapa jenis sarana dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi multimoda adalah angkutan barang yang menggunakan minimal dua moda yang berbeda, yang dilakukan berdasarkan suatu kontrak berupa dokumen angkutan multimoda antara pelaku usaha dan pengguna jasa.

Rencana pengembangan transportasi antarmoda di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. Pengembangan jalur Dermaga Pomako Timika – Dermaga Jinak - Jalan Raya - Bandara Wamena ;
- 2. Pengembangan Jalur Dermaga Pomako Timika – Mumugu – Jalan Raya Yuguru – Batas Kenyamhabema – Wamena ;
- 3. Pengembangan jalur Bandara Nabire – Sungai Mimika – jalan raya Intan Jaya.

2.7.4.3 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

A. Jaringan Energi Listrik

1. Pembangkit Tenaga Listrik

Dengan melihat kondisi wilayah Provinsi Papua Tengah yang merupakan rawan bencana, maka kebutuhan listrik perlu diarahkan pada pengembangan energi yang mandiri, artinya ketersediaan energi di wilayah ini diharapkan mampu melayani kebutuhan masyarakat, fasilitas umum pertambangan maupun pengembangan industri besar maupun kecil, baik dalam kondisi normal maupun darurat.

Berdasarkan potensi dan prospek pengembangnya, rencana pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Papua Tengah dapat dikembangkan dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Pembangkit listrik tenaga air, terdapat di Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai ;
- b. Pembangkit listrik tenaga diesel, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
- c. Pembangkit listrik tenaga surya, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
- d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga uap, terdapat di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika ;
- e. Pengembangan pembangkit listrik tenaga gas, terdapat di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika ;
- f. Pengembangan listrik dengan minyak nabati
- g. Pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang o pengembangan listrik mikro hidro, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
- h. Pengembangan listrik tenaga angin, terdapat di Kabupaten Puncak.

Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Papua Tengah diuraikan pada tabel dibawah. Potensi dapat dikembangkan dengan baik karena kapasitas debit air sungai dan danau sangat besar dan dapat membangkitkan tenaga listrik dalam jumlah besar.

2. Rencana Transmisi Tenaga Listrik

Rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Provinsi Papua dimaksudkan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, dan permukiman. Pengembangan jaringan kelistrikan diselaraskan dengan pengembangan pusat perkotaan, pusat produksi, dan pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya yang mengacu pada

RTRWN. Rencana pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai berikut.

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air
 - Pengembangan PLTA Nabire di Kabupaten Nabire, direncanakan dapat membangkitkan listrik sebesar 1.659 MW dengan pengembangan SUTET yang dapat melayani Kabupaten Nabire, dan sekitarnya
 - Pembangkit listrik tenaga air Einlanden dan Lorentz di Kabupaten Mimika;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Dikembangkan di setiap kabupaten/kota
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Dikembangkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas
Dikembangkan di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Sesuai potensi daerahnya, pembangkit listrik tenaga angin dapat dikembangkan di Kabupaten Puncak

B. Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas sistem terestrial dan nirkabel. Rencana pengembangan sistem terestrial, menggunakan media transmisi jaringan kabel serat optik dan tembaga dan gelombang mikro.

Rencana Interkoneksi antar pusat kegiatan dan antar pusat wilayah di Provinsi Papua maupun dengan wilayah luar sangat memerlukan dukungan sistem komunikasi dan akses informasi. Untuk mendukung sistem interkoneksi tersebut diarahkan pengembangan jaringan teresterial yang mengikuti pola jalan dan pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS) yang dapat menjangkau seluruh distrik, sedangkan sistem telekomunikasi satelit dikembangkan pada wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Arahan pengembangan system jaringan telekomunikasi di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.

- a. Mempertahankan dan memelihara jaringan telekomunikasi melalui integrasi dengan sistem komunikasi lain dan dengan sistem permukiman.

- b. Mengembangkan jaringan komunikasi dengan cara :
 - Mengembangkan prasarana dan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah
 - Mengembangkan jaringan telekomunikasi sampai ke kampung-kampung terutama kampung pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota-kampung.
- c. Mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan kota-kota dan kawasan-kawasan prioritas.

Rencana pembangunan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas antara lain:

- a. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani PKN, PKW, PKSN, PKL dan kawasan strategis untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.
- b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil baik di dataran maupun pulau-pulau kecil, sehingga komunikasi tetap berjalan terutama di kawasan perbatasan dan kawasan strategis.
- c. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan satelit dalam mendorong pengembangan sistem prasarana telekomunikasi.
- d. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

2.7.5 Rencana Pola Ruang

2.7.5.1 Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung di Provinsi Papua terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam-pelestarian alam-cagar budaya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

1. Kawasan Hutan Lindung

Sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, hutan lindung mempunyai arti strategis dalam penentuan pola ruang.

2. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya

4. Kawasan Perlindungan Setempat

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

6. Kawasan Lidung Geologi

7. Kawasan Lidung Lainnya

2.7.5.2 Rencana Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi ;

Kawasan hutan produksi terdiri dari :

a. Produksi Terbatas tersebar di 8 kabupaten ;

b. Produksi Tetap terdapat di kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Mimika dan Nabire ;

c. Produksi Komersial tersebar di 8 kabupaten.

2. Kawasan hutan rakyat ;

Kawasan hutan rakyat tersebar di 8 kabupaten

3. Kawasan peruntukan pertanian ;

Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri dari :

a. Lahan Basah yang terdapat di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire ;

b. Lahan Kering dan Holtikutura tersebar di 8 kabupaten ;

c. Perkebunan dikembangkan dominan di kabuten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire ;

4. Kawasan peruntukan peternakan ;

Kawasan Peruntukan Peternakan dikembangkan di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.

5. Kawasan Peruntukan Perikanan :

Kawasan Peruntukan Perikanan terdiri dari :

- a. perikanan tangkap hanya dapat di kembangkan di kabupate nabire dan kabupaten mimika ;
 - b. perikanan budidaya tersebar di 8 kabupaten ;
 - c. industri perikanan sendiri, baru di kembangkan di kabupaten mimika.
6. Kawasan peruntukan pertambangan ;
- Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari :
- a. Minyak dan Gas Bumi berada di kawasan teluk cenderawasih ;
 - b. Tembaga terdapat di kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak ;
 - c. Emas terdapat di Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai ;
 - d. Batu Bara terdapat di Kabupaten Digiyai, kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika ;
 - e. Logam Dasar sementara hanya terdapat di kabupaten mimika.
7. Kawasan peruntukan industri ;
- Kawasan peruntukan industry terdiri dari :
- a. Industry pengolahan berada di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire ;
 - b. Industry khusus hanya terdapat di kabupaten mimika.
8. Kawasan peruntukan pariwisata ;
- Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari :
- a. wisata budaya dikembangkan di kabupaten mimika (asmat) ;
 - b. wisata Alam dan Minat Khusus tersebar di 8 kabupaten.
9. Kawasan peruntukan permukiman ;
- Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari ;

- a. Perkotaan dengan pengembangan fungsi PKN, PKW, dan PKL disesuaikan dengan RTRW dari masing-masing kabupaten, dimana pengembangan kawasan perkotaan yang sedang difokuskan adalah pembangunan satu kota baru, yaitu kota baru nabire di kabupaten nabire dan kota baru timika di kabupaten mimika ;
 - b. Perkampungan di kembangkan sesuai dengan PERDA RTRW dari masing-masing 8 kabupaten.
10. Kawasan peruntukan lainnya ; Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan yang diperuntukan, khusus untuk kepentingan pertahanan negara.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
3.1.1. Permasalahan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan Dokumen RPD Provinsi Papua tengah Tahun 2024-2026 dan Situasi Eksisting dilapangan, Serta berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sehingga didapat beberapa isu strategis aktual yang dapat diangkat menjadi isu strategis dalam RKPD Tahun 2024. Adapun rincian permasalahan dan isu strategis dari setiap kabupaten yang hadir dalam pertemuan dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No	Kabupaten	Isu Strategis dan Permasalahan	
1	2	3	
1	Kabupaten Nabire	1	Ketergantungan masyarakat akan pemerintah sangat tinggi, namun Pelayanan pemerintah masih rendah
		2	Konektivitas wilayah pada 15 distrik di Kab. Nabire yang belum terkoneksi jalan darat, terutama di Distrik Dipa, Meno , Napan, dan wapoga membutuhkan pembangunan jalan baru
		3	Kurang optimalnya penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
		4	Masih banyak permukiman kumuh pada wilayah pesisir dan pegunungan
		5	SPAM dan fasilitas persampahan yang masih minim
		6	Tingkat kemiskinan ekstrim sangat tinggi
		7	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatkan Daya Saing Lokal dan Regional
		8	Menurunkan Tingkat Prevalensi Stunting
		9	Belum adanya Perguruan Tinggi Negeri
2	Kabupaten Mimika	1	Konektivitas wilayah menuju beberapa kabupaten dan ibukota provinsi masih buruk
		2	Tingkat kemiskinan ekstrim sangat tinggi
		3	Pembangunan infrastruktur perumahan masih rendah
		4	Tingkat keamanan sangat rendah
		5	Belum adanya Perguruan Tinggi Negeri

No	Kabupaten	Isu Strategis dan Permasalahan	
1	2	3	
3	Kabupaten Puncak Jaya	1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		2	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		3	Masalah dan konflik masih menggunakan hukum adat
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Tingkat keamanan sangat rendah
		7	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
4	Kabupaten Intan Jaya	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
5	Kabupaten Paniai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
6	Kabupaten Deiyai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet

No	Kabupaten	Isu Strategis dan Permasalahan	
1	2	3	
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
7	Kabupaten Dogiyai	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)
8	Kabupaten Puncak	1	Tingkat keamanan sangat rendah
		2	Konektivitas wilayah masih rendah
		3	Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
		4	Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
		5	Belum Maksimalnya Jaringan Internet
		6	Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah dan tidak memenuhi SPM
		7	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
		8	Tingginya Prevalensi Stunting
		9	Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah

Selain permasalahan pembangunan, perlu dilakukan identifikasi permasalahan atau hal-hal lain yang berpotensi menjadi penghambat pelaksanaan program atau kegiatan yang oleh OPD/SKPD. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi salah satu prioritas penyelenggaraan urusan di provinsi DOB. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang didapat dari masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa

terdapat 5 isu strategis yang diangkat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Tengah yang mempertimbangkan urgensi pembangunan, masalah serupa yang terjadi di seluruh kabupaten, dan masalah yang merupakan kewenangan provinsi. Lima isu strategis di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Lima Isu Strategis dan permasalahan Aktual di Provinsi Papua Tengah

No.	Isu Strategis	Permasalahan Pendukung
1	2	3
1	Penyediaan Infrastruktur Pemerintahan	Belu m Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
		Belum adanya infrastruktur penunjang untuk penyelenggaraan urusan
		Penyesuaian kemampuan fiskal daerah
2	Pemenuhan Pelayanan Dasar	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan
		Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan
		Rendahnya Konektivitas Jaringan sarana dan Prasarana Infrastruktur
3	Peningkatan Daya Saing Wilayah	Rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) Papua
		Tingginya tingkat kemiskinan penduduk
		Tingginya Angka Perngangguran Terbuka
4	Peningkatan Keamanan Wilayah	Masih adanya konflik antara kelompok
		Penanganan pengungsi akibat konflik
5	Konektivitas Wilayah	Masih terdapat daerah terisolasi dan belum adanya pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah (jalan, pelabuhan, bandara)
		Kebutuhan untuk mengaktifan kembali pembangunan jalan trans nasional terhambat karena alasan keamanan

Sumber : RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2026

3.1.3. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik (good governance) merupakan konsep pada otonomii daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih. Hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomii daerah saat ini dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tata kelola pemerintahan diukur dari beberapa indeks, diantaranya yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Adapun kondisi tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Setiap Kabupaten

Kabupaten	SPBE	RB	SAKIP	IPP
Provinsi Papua	1.876	CC	B	B-
Nabire	-	-	C	C-
Mimika	-	-	C	D
Puncak Jaya	-	-	C	-
Intan Jaya	-	-	-	-
Paniai	-	-	C	-
Deiyai	-	-	C	-
Dogiyai	-	-	-	-
Puncak	-	-	C	-

Sumber: Portal Satu Data Kementerian PANRB, 2023

Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Provinsi Papua pada tahun 2022 masih rendah, yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi SPBE Provinsi yang berada pada kategori cukup (Kementerian PANRB, 2022). Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur TIK di Wilayah Papua. Di samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Papua masih belum optimal, yang ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di

Provinsi Papua pada tahun 2022 termasuk dalam kategori cukup (CC) (Kementerian PANRB, 2022). Selain itu, penerapan sistem merit pada pemerintah Provinsi Papua menunjukkan hasil yang kurang baik, di mana predikat Indeks Sistem Merit berada pada kategori buruk (KASN, 2022).

3.2. Permasalahan Urusan Pemerintahan Daerah

Setelah pembentukan daerah otonomi baru, secara administratif kabupaten- kabupaten di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam Provinsi Papua Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Mee Pago memiliki capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangunan (tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita) relatif lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan; (2) urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta (6) urusan bidang social.

3.2.1.1 Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Papua Tengah telah lama menjadi perhatian nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikan di Papua Tengah dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun menunjukkan trend yang meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi capaian kedua indikator tersebut di Papua Tengah masih tertinggal dengan rata-rata di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Papua Tengah menunjukkan terdapat tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan akses menyangkut kemudahan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalah mutu terkait bagaimana proses Pendidikan dapat dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan keluaran yang kompetitif. Sementara tata kelola merupakan sebuah hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor tersebut, uraian terhadap rumusan masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Akses, kualitas dan tata kelola pendidikan yang belum optimal	1	Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan	1	Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi
			2	Rendahnya proporsi pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan
			3	Belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Beberapa kabupaten mengalami kekurangan fasilitas sekolah menengah.
			4	Kondisi topografi yang sangat ekstrim dan variatif sehingga menyulitkan peserta didik mengakses sekolah
	2	Belum optimalnya mutu/ kualitas layanan pendidikan	1	Belum optimalnya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
			2	Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas relatif masih rendah
			3	Belum maksimalnya melek Calistung (membaca, menulis dan berhitung)
			4	Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti kelas dalam kondisi rusak, kekurangan fasilitas laboratorium, dsb
			5	Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A dan B
			6	Pendidikan ekstrakurikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal
			7	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran
			8	Belum berkembangnya sekolah menengah, politeknik dan perguruan tinggi yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti jurusan pertanian, pariwisata, pertambangan
			9	Rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				sekolah menengah, politeknik dan universitas, serta kurangnya program pemagangan yang terstruktur sehingga kompetensi lulusan kurang relevan
	3	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan	1	Belum maksimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
			2	Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi
			3	Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah
			4	Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran
			5	Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Tengah.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.2 Urusan Bidang Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Tengah tergolong rendah yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk pada balita. Permasalahan- permasalahan yang memberikan sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang kesehatan terdapat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah	Akar Masalah	
1	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan belum memadai	1 Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas	1	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial di 3 kabupaten telah mencapai 100%, namun di Kabupaten Nabire hanya 38,5%
			2	Rasio 1 posyandu per jumlah balita masih melebihi 1: 100
			3	Belum semua kabupaten melaksanakan Posbindu PTM sesuai standar
			4	Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine belum berjalan sesuai standar
	2	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai Serta penyebarannya belum merata	1	Baru 42,6% puskesmas di wilayah Provinsi Papua Tengah yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan
			2	Distribusi tenaga medis, perawat dan bidan belum merata, terutama untuk daerah-daerah sulit
	3	Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal	1	Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan anak tidak berjalan secara teratur
			2	Cakupan pelayanan ibu dan anak masih rendah, terutama di kabupaten yang memiliki wilayah sulit
			3	Prevalensi penyakit menular (Tb, malaria, HIV, diare, pneumonia) tinggi
			4	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi rendah
			5	API Malaria masih tinggi, dan belum ada kabupaten yang dinyatakan telah mencapai eliminasi malaria
			6	Belum ada kabupaten yang memenuhi kriteria melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga
			7	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan sesuai standar

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				8	Pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain meliputi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat
				9	Sebagian target-target Renstra Kemenkes di tingkat provinsi belum terpenuhi, antara lain mencakup penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta peningkatan sumber daya kesehatan
2	Kualitas SDM Provinsi Papua Tengah masih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor gizi sejak 1000 HPK	1	Tingginya prevalensi balita stunting	1	Belum semua kabupaten menjalankan surveilans gizi sesuai standar
				2	Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan
				3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan intervensi spesifik untuk pencegahan stunting masih rendah.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat dalam Tabel 3.6

Tabel 3. 6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi(jalan dan jembatan) serta sistem pengendali aliran air.	1	Masih banyaknya jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya
			2	Kurangnya kapasitas OPD untuk mengidentifikasi dan mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan prioritas
			3	Lambatnya rehabilitasi jalan/ jembatan rusak
			4	Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
			5	Kurangnya akses jalan antar ibu kota kabupaten menuju ke distrik serta kampung yang bisa terakses
			6	Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua tengah terutama ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan
			7	Belum adanya pengendali banjir untuk kawasan pemukiman dan pertanian yang terletak disepanjang aliran sungai yang berpotensi banjir
			8	Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
			9	Belum terpenuhinya kebutuhan saluran drainase
	2	Belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan	1	Manajemen infrastruktur dasar yang masih sangat rendah
			2	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
		infrastruktur dasar penyedia air baku dan air bersih		tentang pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat
			3	Belum tercukupinya kesiapan sarana pendukung air bersih
			4	Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber sumber air baku
	3	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur sanitasi	1	Belum adanya sarana pengolahan sampah untuk masyarakat dan TPA di berbagai wilayah di Provinsi Papua Tengah
			2	Rendahnya implementasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD)
			4	Tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS)
	4	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur	1	Kondisi geografis wilayah yang sulit berimplikasi pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah
	5	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	1	Belum optimalnya implementasi dan pengawasan pemanfaatan ruang
			2	Rendahnya kualitas data tata ruang wilayah, baik data pemetaan, kuantitatif, serta kualitatif
			3	Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai
			4	Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Tengah
			5	Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.4 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman terdapat dalam Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Papua Tengah.

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	1	Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat	1	Kurang memadainya sanitasi dan jamban yang aman, bersih dan layak pada rumah tangga
			2	Masih banyaknya keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni
			3	Rendahnya kepemilikan rumah dengan kontruksi yang memenuhi persyaratan standar keamanan dan keselamatan
			4	Masih terdapat 13 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah, dengan penanganan yang kurang optimal
			5	Belum optimalnya jumlah rumah yang dibangun untuk Orang Asli Papua (OAP)
	2	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan	1	Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan-kepulauan telah mengakibatkan kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di wilayah Provinsi Papua Tengah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan masyarakat dan penataan kawasan permukiman
			3	Pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				seringkali masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.5 Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketentraman, ketertiban serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya penanganan penyelesaian masalah terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1	Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban.	1	Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
			2	Belum optimalnya penegakan perda dan perkara
			3	Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat, serta masih tingginya tindak pidana yang belum tertangani
			4	Belum memadainya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan
			5	Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang
			6	Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
	2	Belum optimalnya penyelenggaraan stabilitas politik daerah	7	Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat
			1	Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan
			2	Lemahnya peran partai politik dan DPRD sebagai lembaga demokrasi
			3	Rendahnya tingkat kebebasan sipil dalam berkumpul dan berserikat
			4	Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
	3	Tingginya Resiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif	1	Provinsi Papua Tengah termasuk provinsi yang memiliki kelas Resiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi
			2	Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas Resiko multi bencana tinggi
			3	Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
			4	Masih rendahnya kesadaran terhadap Resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
			5	Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang belum ditangani dengan baik
			6	Belum optimalnya kapasitas aparat daerah dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.1.6 Urusan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang sosial di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.9

Tabel 3. 9 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Sosial di Provinsi Papua Tengah.

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Tingginya kerentanan sosial masyarakat	1	Lemahnya perlindungan sosial dan mitigasi Resiko bencana sosial maupun bencana alam	1	Tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan
			2	Masih banyaknya kelompok orang asli papua dalam komunitas adat terpencil yang belum terjamah dan memiliki aksesibilitas dalam pembangunan
			3	Kekosongan bantuan sosial atau penanganan Resiko sosial yang belum responsif terhadap kondisi kelompok miskin dan rentan, seperti pada perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi darurat
			4	Belum optimalnya pemberian paket bantuan dan rehabilitasi sosial kepada PMKS
			5	Belum tersedianya peralatan logistik (bahan pembangunan rumah/logistik lainnya) dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam
	2	Lemahnya akurasi dan validitas data penerima bantuan	1	Belum optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa)

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
		perlindungan sosial	2	Belum tersedianya data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perlindungan sosial (bencana sosial, bencana alam, dan masyarakat kurang mampu)
			3	Belum adanya integrasi antara data penerima bantuan perlindungan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan pendataan terpisah OAP dan non-OAP by name by address secara berkala yang dilakukan di tingkat kampung melalui SIO Papua
	3	Lemahnya kualitas SDM yang menangani masalah kesejahteraan sosial	1	Belum memadainya SDM yang terdidik/ terlatih di bidang rehabilitasi sosial
			2	Keterbatasan pendampingan pelayanan untuk penduduk miskin dan rentan, serta strukturisasi pendamping sosial di masyarakat
	4	Lemahnya kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	1	Pembiayaan bantuan sosial (seperti bantuan tunai, bantuan siswa miskin, bantuan penyandang difabel) saat ini sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD, dan belum mengoptimalkan sumber pembiayaan lain seperti hibah, CSR, TJSL, PKBL, maupun filantropi
			2	Kurangnya koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja; (2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup; (6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) urusan bidang pemberdayaan masyarakat kampung; (9) urusan

bidang perhubungan; (10) urusan bidang komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga; (14) urusan bidang kebudayaan.

3.2.2.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Papua Tengah masih cukup rendah, dimana angkanya pada tahun 2020 adalah sebesar 69.55%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih Banyak penduduk Angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Tengah juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasikan masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi peningkatan sumberdaya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang dibutuhkan. Tabel 3.10 akan memberikan pemetaan antara rumusan masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakerjaan.

Tabel 3. 10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja di Papua Tengah

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
1	Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Rendahnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) tenaga kerja untuk mendukung produktivitas industri, karena mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah
				2	Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya mismatch antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		3 Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Papua Tengah yang memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Tengah hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian TenagaKerja
		4 Longgarnya ikatan kerja (engagement) serta tingginya kecenderungan pencarian kerja baru/meninggalkan pekerjaan(turnover rate) yang dapat meningkatkan Resiko untuk tidak bekerja
	2 Belum terjalinnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja	1 Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangatrendah
		2 Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
		3 Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal
	3 Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan	1 Belum terealisasinya pemetaan/ data dukung kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan yang berinvestasi di Papua Tengah sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Tengah
		2 Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja
		3 Belum ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun

Pokok Masalah		Rumusan Masalah		Akar Masalah	
					dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Tengah baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi & perminyakan
2	Belum optimalnya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan	1	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan Kerja	1	Pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan pendapatan buruh/karyawan sebagai dampak pandemi Covid-19
				2	Meningkatnya pekerja sektor pertanian-informal di perdesaan yang berpotensi meningkatkan pekerja miskin di perdesaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.2 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses- proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Papua Tengah masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Papua Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah	1	Belum optimalnya perlindungan hak serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan	1	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
			2	Banyaknya perkawinan yang tidak sah
			3	Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan
			4	Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal
			5	Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan
	2	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1	Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik, yaitu: a. kepemilikan akte kelahiran; b. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; c. puskesmas ramah anak, d. kampung anak sejahtera; e. sekolah ramah anak; f. pusat kreatifitas anak; g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); h. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); i. media informasi layak anak seperti PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak)
			2	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras pada anak
			3	Masih terdapat kasus konsumsi video porno untuk anak di bawah umur
			4	Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga
			5	Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu
			6	Masih terjadinya kasus

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
				diskriminasi dan eksploitasi anak
			7	Masih terdapat kasus pernikahan dini pada anak usia remaja
			8	Pelayanan untuk anak yang sedang dalam masa tahanan kurang maksimal
	3	Belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan	1	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan PNS
			2	Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit
	4	Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
			2	Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Tengah
			3	Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.3 Urusan Bidang Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Tingginya kerawanan pangan masyarakat	1	Rendahnya ketahanan pangan masyarakat	1	Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal
			2	Terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
			3	Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Papua Tengah masih cukup tinggi
			4	Belum optimalnya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
	2	Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	1	Rendahnya daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi pangan yang berada di bawah standar kecukupan gizi
			2	Akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
			3	Masih terbatasnya infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan
	3	Belum optimalnya tata kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi	1	Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan
			2	Terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pemdamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.4 Urusan Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala oleh tingginya konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak milih dan tanah adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah. Pelayanan administrasi pertanahan juga bukan hal yang mudah di Papua Tengah, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan di Papua Tengah dapat dilihat dalam Tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi Papua Tengah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah	1	Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1	Banyaknya tanah yang terlantar, dengan status kepemilikan yang belum jelas
			2	Belum adanya database/pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah
			3	Pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis
			4	Rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi
			5	Belum harmonisnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang sektoral
	2	Belum optimalnya pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat	1	Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat
			2	Belum maksimalnya pengakuan negara/ pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat
			3	Belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Sumber: Hasil Analisis, 2023